

KIBAR

TAMANMARTANI

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta,
kecuali mencantumkan identitas pemegang hak cipta.

KIBAR TAMANMARTANI



Gandang Hardjanata

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Gandang Hardjanata

Kibar Tamanmartani/Gandang Hardjanata; editor: Arif Giyanto—
Yogyakarta: Pandiva Buku 2021.

x + 186 hal; 21 cm

ISBN: 978-602-5583-41-4

1. Judul I. Giyanto, Arif

KIBAR TAMANMARTANI

Penulis:

Gandang Hardjanata

Ketua Tim Penulis:

Arif Giyanto

Editor:

Hanang Widiandhika

Perancang Isi:

D'Woch

Desain Kover:

AndDan Creative

Edisi Pertama: Mei 2021

Pandiva Buku

MidClass Outlet

Gang Puntodewo No. 164 D, Kanoman, Karang Jambe, Banguntapan
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198

Pengantar

Kunci kesejahteraan sebuah desa adalah sumber daya manusianya. Apabila berkualitas manusianya, semua potensi yang dianugerahkan-Nya pun dapat diolah untuk kemanfaatan dan kesejahteraan. Sebaliknya, jika tak baik orang per orangnya, rasanya sangat sulit menggambarkan potensi sebuah desa sebagai kekuatan karya yang lestari.

Sayangnya, tidak mudah melahirkan SDM mumpuni. Bila ada, tak sedikit dari mereka yang memilih untuk berkehidupan di luar desa tempat tinggalnya. Desa sebagai lingkungan terdekat menjadi vital perannya untuk membentuk SDM dengan kapasitas prima, dengan sumber daya yang dimiliki desa.

Terlebih, cara pikir generasi muda yang semakin hari semakin *instant*. Biasanya, proses bukan menjadi

pembelajaran. Semua mata mengarah pada hasil. Sementara hasil yang baik, tentu saja diolah dalam proses yang tepat. Walhasil, daya tahan SDM untuk mengkreasi solusi pada setiap persoalan yang ditemui, terkadang justru menumbuhkan keraguan baru, bahkan permasalahan baru.

Bagi saya, peran pendidikan dan keluarga sangatlah penting untuk menentukan baik-buruk sebuah generasi. Pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada formalisme tapi juga jati diri dan kreativitas. Keluarga yang tidak hanya menuntut anak untuk berprestasi tanpa sumbangsih perhatian pada kemandirian dan keberdayaan pikir.

Karena, dengan begitu, karakter kuat generasi akan tumbuh subur dan membentuk kemasyarakatan yang juga berkualitas. Peran dari masing-masing keluarga untuk benar-benar bertanggung jawab pada kebaikan anak-anak, selanjutnya mampu membuat desa semakin berdaya.

Tak lupa, pengetahuan. Desa membutuhkan pengetahuan. Warga desa membutuhkan asupan pengetahuan yang cukup. Dengan pengetahuan yang cukup dan disadari, jalan terjal pembangunan desa akan terasa lebih ringan.

Untuk itulah, saya menulis buku ini. Sungguh banyak kisah baik dan hal inspiratif yang lahir dari Tamanmartani. Semua itu lekat dengan keseharian warga, bukan sesuatu yang jauh dari pandangan atau jangkauan. Dengan menuliskannya, catatan-catatan tentang Tamanmartani dapat berubah menjadi pengetahuan. Lebih tepatnya, pengetahuan yang dituliskan. Karena sebelumnya, pengetahuan yang ada lebih dominan berpindah dari satu orang ke orang lain, tidak terdokumentasi dengan baik.

Saya berharap, semangat untuk menuliskan apa-apa yang ada di Tamanmartani terus membesar dan meluas ke berbagai kalangan. Hingga kelak, semua warga Tamanmartani terbiasa menuliskan pengetahuannya dan bermanfaat untuk khalayak luas.

Penulis



Daftar Isi

Pengantar	v
Daftar Isi.....	ix
Pendahuluan	1
Bagian 1	
Tentang Tamanmartani	17
Sekilas Tamanmartani.....	19
Dua Periode Kepemimpinan	30
Kalurahan Terbaik Se-Kabupaten Sleman 2021	40
Kepemimpinan Transformasional	48
Kelembagaan Desa, Pemangku Kepentingan Strategis ..	64
Peran Aktif Karang Taruna	81
Pemberdayaan Linmas	89
Bagian 2	
Pelayanan Berbasis Kepedulian.....	101
Pelayanan Prima	103

Membangun Ratusan Sumur Resapan	113
---------------------------------------	-----

Bagian 3

Kalurahan Mandiri	123
--------------------------------	------------

Asosiasi Profesi dan Ngabei Mart, Pilar Utama

Perekonomian Tamanmartani.....	125
--------------------------------	-----

Sister Village	141
----------------------	-----

Wisata Era Digital	150
--------------------------	-----

Pupuk Murah dari Kotoran Ternak.....	157
--------------------------------------	-----

Pengembangan Desa Wisata dengan Model

Smart Village.....	170
--------------------	-----

Bibliografi	183
-------------------	-----

Tentang Penulis	185
-----------------------	-----

Pendahuluan

Urip iku urup

Umumnya, Kepala Desa atau Lurah mengawali kepemimpinan dengan analisis strategis seputar isu-isu populis, seperti kemiskinan, kesenjangan, atau korupsi dan pelayanan publik yang lebih baik. Namun, Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman memilih ‘Kalurahan Berdikari’ dalam slogan ‘Kibar Tamanmartani’.

Saya sangat berkeinginan menjadikan warga Tamanmartani sebagai tuan rumah di tanahnya sendiri. Mandiri di desanya sendiri. Itu saja dulu. Saya tentu saja tengah membahas desa mandiri, karena menyematkan keberdikarian dalam setiap gerak kalurahan. Sebuah semangat berkarya semasif mungkin untuk mengangkat derajat orang per orang agar tidak tergantung sepenuhnya pada pihak lain.

Pada periode kedua kepemimpinan Tamanmartani (2020-2026), terjadi perubahan nomenklatur. Penyebutan Kepala Desa berubah menjadi Lurah, pun dengan Desa menjadi Kalurahan. Selanjutnya, Lurah dikukuhkan sebagai ‘pemangku keistimewaan’.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelarasan bentuk kelembagaan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan bahwa setelah pelaksanaan pelantikan Lurah oleh Bupati, Lurah dikukuhkan sebagai pemangku keistimewaan oleh Gubernur.

Saya dilantik bersama 81 Lurah se-Kabupaten Sleman oleh Bupati Sleman Sri Purnomo serta dikukuhkan

oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, secara daring dan dipusatkan di Gedhong Pracimasana Kompleks Kepatihan Yogyakarta, pada hari Kamis, 22 Oktober 2020.

Ketika memberi sambutan, Bupati Sleman mengatakan, penataan kelembagaan Pemerintah Kalurahan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat menuju kalurahan yang berdikari, berbudaya, rukun, berketahanan, demokratis, maju, dan makmur.

Pada konteks Kalurahan Tamanmartani, saya kemudian menginisiasi 'Kibar Tamanmartani'. Semula, Kibar Tamanmartani sekadar dimaknai sebagai kreatif, tapi berdasarkan masukan dari pimpinan Kalurahan lainnya, diganti menjadi singkatan dari 'kesejahteraan, inovatif, berbudaya, agamis, dan rukun'.

Kibar Tamanmartani merepresentasi keberdikarian desa, manifestasi dari kepemimpinan transformasional yang telah terasa signifikan pengaruhnya. Gelora semangat maju sebagai desa mandiri tampak pada gairah warga untuk membawa Tamanmartani menuju kalurahan tujuan wisata yang nyaman bagi siapa pun.

Tentang Desa Mandiri, sebuah referensi patut ditekankan. Sebuah buku berjudul *Menuju Desa Mandiri*,

buah kerja sama Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan, dan Informasi (BALILATFO) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPPM) Universitas Bengkulu, serta didukung oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.¹

Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Mandiri dapat diartikan pula sebagai desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar.

Selain itu, Desa Mandiri bisa berarti desa yang mampu menghasilkan produk berdaya saing, lembaga

1. Basuki Sigit Priyono dkk. 2019. *Desa Mandiri*. Jakarta: Pusdatin Balilatfo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. h. x-xii.

sosial yang aktif, tingkat partisipasi, keswadayaan masyarakat tinggi, dan masyarakat miskin terlibat aktif dalam rantai produksi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi upaya pencapaian Desa Mandiri adalah potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, pasar, serta kelembagaan dan budaya lokal.

Potensi sumber daya manusia yang dimaksud, yakni motivasi dan budaya tinggi warga desa. Selain itu, memiliki jiwa wirausaha yang kuat serta mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal. Sementara potensi sumber daya alam meliputi potensi desa yang berdaya saing untuk dikembangkan, pengelolaan potensi desa secara berkelompok, skala usaha berbasis sentra.

Selanjutnya, faktor pasar melingkupi produk yang dikembangkan benar-benar dibutuhkan pasar. Produk juga mempunyai daya saing pasar. Terakhir, faktor kelembagaan dan budaya lokal mewakili pelaksanaan program yang didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

Setidaknya, ada empat strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Desa Mandiri. *Pertama*, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di

desa yang kritis dan dinamis. *Kedua*, memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Ketiga*, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. *Keempat*, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.

Keberdikarian desa boleh dikatakan juga lekat dengan semangat Trisakti Bung Karno. Tiga fondasi penting, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan menjadi dasar setiap langkah kepemimpinan Tamanmartani. Kibar Tamanmartani dan Trisakti Bung Karno seperti berkait-kelindan serta terinternalisasi dalam bingkai jati diri warga.

Trisakti bermula dari pidato Bung Karno di Istana Negara Jakarta pada 28 Maret 1963 yang sarat dengan ide-ide pemikiran ekonomi, kemudian dikenal sebagai Deklarasi Ekonomi (Dekon).²

Selanjutnya, pada pidato 17 Agustus 1964, Bung Karno mengemukakan prinsip Trisakti Tavip atau Tahun

2. Artikel Rusman berjudul Mengingat (Kembali) Pemikiran 'Deklarasi Ekonomi' Bung Karno. <https://theglobal-review.com/mengingat-kembali-pemikiran-deklarasi-ekonomi-bung-karno/> Diakses pada 15 Mei 2021.

Vivere Pericolos. Sang Proklamator menjelaskan tiga prinsip berdikari, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Puncaknya, politik berdikari menjadi populer setelah Bung Karno memberi judul pidatonya pada 17 Agustus 1965, 'Tahun Berdikari'. Tidak boleh lagi terjadi 'ayam mati di lumbung padi', karena Tanah Air Indonesia kaya raya.

Bagi Tamanmartani, warga kalurahan tidak boleh lagi ada yang kekurangan, karena dianugerahi kekayaan melimpah. Tekad membangun Tamanmartani agar tidak bergantung pada siapa pun sungguh merepresentasi semangat Trisakti Bung Karno.

Saya lantas berusaha mengenali potensi dan kapasitas Tamanmartani. Setelahnya, disusunlah perencanaan pembangunan Desa Mandiri, yang berlanjut dengan pembangunan visi 'Kibar Tamanmartani'.

Memasuki tataran lebih teknis, Pemerintahan Kalurahan Tamanmartani lantas mengimplementasikan Rencana Pembangunan Kalurahan Mandiri, serta tak lupa, melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan. Upaya mewujudkan 'Kibar Tamanmartani' tidak lupa dibarengi dengan pengembangan jejaring kerja desa.

Seperti yang saya sampaikan kepada semua orang. Memberi pemahaman dengan dasar untung-rugi lebih mudah diterima warga. Kalau Tamanmartani memiliki tempat wisata akan untung. Jadi, saya mengajak warga untuk tetap rukun.

Saya memulainya dengan melakukan pemetaan, dusun mana yang dapat dijadikan ikon, punya kekuatan atau pun potensi yang bisa dijadikan destinasi, serta dusun mana yang bisa menjadi *homestay*. Kawasan tinggal dapat satu paket dengan ketersediaan kuliner desa dan suvenir.

Pemetaan pelaku kesenian pun dilakukan. Dusun apa menampilkan kesenian apa menjadi pertimbangan keberhasilan wisata. Setelah itu, warga bisa menjadi penampil, turut beratraksi kesenian. Dalam sudut pandang pariwisata, atraksi kesenian termasuk destinasi.

Prinsipnya, pada tahap awal, Tamanmartani membangun amenitas pariwisata. Amenitas adalah berbagai fasilitas di luar akomodasi yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi. Amenitas bisa berupa fasilitas pariwisata, seperti rumah makan, restoran, toko cinderamata, serta fasilitas umum, seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lainnya.

Amenitas merupakan salah satu elemen penting pendukung *destination mix*, karena memenuhi kebutuhan wisatawan yang tidak disediakan oleh akomodasi selama berwisata, atau ketika menikmati daya tarik wisata, misalnya atraksi, serta aktivitas dengan memanfaatkan aksesibilitas yang ada.

Dalam karyanya berjudul *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*, Edward Inskeep menuturkan komponen-komponen pengembangan pariwisata yang erat dengan pendekatan perencanaan pariwisata, yaitu atraksi wisata, akomodasi, fasilitas dan pelayanan wisata lainnya, transportasi, infrastruktur, serta elemen institusi.³

Menurut Inskeep, daya tarik wisata dibagi menjadi tiga kategori, yakni *natural attraction*, *cultural attraction*, *special types of attraction*. *Natural attraction* atau daya tarik alam berdasarkan bentukan lingkungan alami, misalnya iklim, pemandangan, flora, fauna, serta keunikan alam lainnya.

Cultural attraction atau daya tarik budaya berdasarkan pada aktivitas manusia. Contohnya, mencakup sejarah, arkeologi, religi, dan kehidupan tradisional. Sementara

3. Inskeep, Edward. 1991. *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.

special types of attraction merupakan aksi yang tidak berhubungan dengan kedua kategori sebelumnya, tetapi atraksi buatan, seperti *theme park*, sirkus, mall, dan lain-lain.

Saya mengupayakan sinergitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, maupun Kalurahan Tamanmartani, supaya akselerasinya lebih baik, dan seirama.

Dalam konteks keistimewaan Yogyakarta, dengan adanya Dana Keistimewaan (Danais) ketentuannya pun telah jelas, yakni setiap kalurahan dapat mempertahankan keistimewaan dengan inisiasi kreatif.

Pada tahun 2021, Pemerintah DIY menggelontorkan Danais sebesar Rp18,78 miliar untuk 32 kalurahan. Danais yang dikucurkan untuk 32 kalurahan tersebut berasal dari APBD DIY murni 2021. Total Danais DIY tahun 2021 sebesar Rp1,32 triliun. Danais dapat dimanfaatkan lebih optimal oleh Pemerintah Kalurahan untuk memberdayakan masyarakat, sehingga tujuan Danais untuk kesejahteraan dan ketenteraman bisa terwujud.

Penggunaan Danais di kalurahan tidak seperti Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD). Ada syarat

khusus penerima Danais, di antaranya untuk program desa mandiri budaya, untuk balai budaya, untuk karang-kopek, untuk padat karya istimewa, dan untuk budaya maritim desa di sepanjang pinggir pantai selatan DIY. Penyaluran Danais ke kalurahan melalui pola Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Kalurahan penerima Danais harus mengajukan proposal terlebih dahulu yang kemudian diverifikasi oleh Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat. Proposal tersebut harus disusun oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Apabila melalui BKK, desa tidak memiliki kewenangan untuk membuat perencanaan dan penganggaran kegiatan yang dibiayai Danais. Desa hanya *ketempatan* uang. Kelompok masyarakat yang merencanakan program, mengerjakan, serta mengawasinya.

Apalagi sekarang Pemerintah Pusat sedang getol-getolnya mendorong pembangunan wisata, karena ternyata ketahanan ekonomi nasional memang bergerak ke sana. Pembangunan wisata dianggap paling murah dan secara potensi tidak perlu mencari-cari, sebab sudah ada dari sananya.

Berdasarkan laporan tahunan statistik Indonesia yang diterbitkan Badan Pusat Statistik tahun 2019, penduduk Indonesia tersebar di 98 kota dan 83.931 desa yang

terletak di lembah, lereng, dan hamparan. Hal tersebut menegaskan bahwa distribusi penduduk Indonesia yang sebagian besar tinggal di wilayah perdesaan atau rural area.

Dalam Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dimaktubkan pandangan bahwa potensi penduduk di wilayah pedesaan dengan karakter kehidupan yang khas dan terbangun dari budaya yang hidup dalam masyarakat lintas generasi merupakan potensi dan kekuatan dalam kerangka pengembangan daya tarik wisata untuk meningkatkan diversifikasi daya tarik serta daya saing pariwisata Indonesia.

Potensi daya tarik yang sebagian besar ada di daerah pedesaan apabila mampu dikelola melalui pendekatan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan secara terpadu, sangat dimungkinkan dapat memberi nilai tambah, tidak saja dari aspek ekologis, edukatif, dan aspek sosial budaya, tetapi juga nilai tambah dari aspek rekreatif dan aspek ekonomis yang bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa, sekaligus meminimalisasi tingkat kemiskinan dan kesenjangan pembangunan di pedesaan.

Pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) dapat menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata di

pedesaan yang mencegah urbanisasi masyarakat desa ke kota. Pengembangan wisata pedesaan mendorong pelestarian alam, antara lain bentang alam, persawahan, sungai, dan danau yang pada gilirannya akan mereduksi pemanasan global.

Tugas pemerintah dalam pembangunan desa itu dari sektor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kalau tiga itu bisa, semua hal bisa selesai. Tugas Lurah hanya itu.

Oleh karena itu, apabila Tamanmartani berupaya membangun keberdikarian, salah satunya dengan pariwisata, harus bertumpu pada sektor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Integrasi ketiganya adalah fondasi utama eksis-tidaknya Tamanmartani di masa depan. Apabila salah satunya saja bermasalah, semua akan bermasalah. Ketiganya dapat saling menguatkan dengan iktikad baik warga yang turut berkolaborasi positif ke arah Tamanmartani berdikari.

Saya sadar, semua ini tentu saja tak mudah. Setiap program pembangunan, tidak selalu langsung tampak di depan mata, tapi bisa jadi membutuhkan waktu hingga puluhan tahun. Namun, bila telah sampai waktunya, semua warga pada akhirnya akan bersyukur dan menikmati hasil pembangunan yang ada.

Contoh, program infrastruktur Pemerintahan Jokowi, terutama jalan tol. Menurutnya, meski tak mudah, salah satu tujuan pembangunan jalan tol adalah memecah titik konsentrasi perekonomian Jakarta. Belajar dari pembangunan Batam yang tersentral, kemudian saat didera permasalahan, perlahan meredup. Nah, apa yang terjadi di Batam jangan sampai terjadi di wilayah saya.

Warga yang memahami visi kalurahan juga bagian penting. Jadi, semisal kelak Tamanmartani dipimpin oleh sumber daya manusia yang kurang kapabel sekalipun, tatanan dan fondasi yang telah dibangun tidaklah rusak. Semua masih dapat berjalan dengan sendirinya, bahkan terus membaik.

Saya bercita-cita, desa itu punya sistem. Mulai sekarang, *kanca-kanca* saya ajak berbagi. Mereka saya beri tugas. Saya kasih pemahaman. Tanpa mereka, bisa dipastikan, saya tidak bisa bertugas dengan baik. Sistem yang saya maksud, memunculkan kekuatan di masing-masing titik. Tak lama lagi, tiap pedukuhan akan saya dorong untuk mandiri. Pedukuhan Mandiri.

Upaya Kalurahan Tamanmartani untuk mewujudkan Kalurahan Berdikari dalam slogan Kibar Tamanmartani boleh dibilang sebuah gebrakan inovatif. Kibar

Tamanmartani pada praktiknya benar-benar eksis, karena memenuhi kesejahteraan warga, dengan program dan gerakan inovatif, serta mempertahankan sistem nilai kalurahan yang berbudaya, agamis, dan rukun.

Kibar Tamanmatani tidak mungkin berhasil, hanya dalam satu dan dua tahap, atau sekadar satu dan dua sentuhan. Kolaborasi segenap lapisan warga Tamanmartani sebagai bagian dari gerakan kemandirian kalurahan menjadi penentu utamanya. Bila ada yang kurang maksimal, segeralah orang per orang lain bersumbangsih. Sebab, ibarat tubuh, semua warga adalah bagian tubuh. Sebagian terasa sakit, semua turut merasakannya. Pun bila sebagian menikmati kebahagiaan, semua pasti menikmatinya.

Miliu pembelajaran yang berdaya dukung warga pembelajar dapat menjamin keberlangsungan reproduksi pengetahuan. Bahwa ada pengetahuan yang dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan terus-menerus untuk kemajuan Tamanmartani. Suasana belajar yang tak berkesudahan dapat membuka ruang kritis dan tabu yang bisa jadi selama ini kurang terekspose, lantaran faktor kelaziman. Sementara praktiknya, zaman telah berubah, dan tafsir tentang itu pun mulai dimodifikasi. Meski jelas, norma dan nilai kemasyarakatan akan tetap dijaga.

Tamanmartani adalah potret keberanian desa untuk berubah, dalam situasi yang tak selalu menguntungkan. Keberanian itu terasa inspiratif bagi desa lain, yang bisa jadi dianugerahi sumber daya lebih baik. Lebih dari semua itu, Tamanmartani adalah cerminan kesungguhan dan kebaikan antar-generasi yang dapat dipupuk, lalu menyuburkan harapan untuk hidup yang jauh lebih baik dan beradab. Terus berkibar, Tamanmartani.

Bagian 1

Tentang Tamanmartani





Sekilas Tamanmartani

Kalurahan Tamanmartani merupakan salah satu kalurahan di wilayah Kapanewon Kalasan. Hasil-hasil pertanian Tamanmartani adalah padi dan berbagai tanaman palawija, karena tanahnya yang subur, seperti daerah-daerah lain di sekitaran Gunung Merapi. Selain itu, terdapat pula hasil tambang golongan C, berupa batu dan pasir. Di sepanjang Tamanmartani mengalir Sungai Opak dan Sungai Gendol yang berhulu Gunung Merapi.

Kalurahan Tamanmartani memiliki beragam wisata desa. Berbagai potensi padukuhan didorong untuk membangkitkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama 5758 dibaca Maju Mapan.

Cikal bakal BUMDes 5758 Kalurahan Tamanmartani menangani sampah. Mulai 2012, sampah dikelola untuk

meningkatkan ekonomi masyarakat. Sampah residu. Ada yang dijual dan diolah menjadi kerajinan bernilai tinggi. Sisanya dibuang ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.

Selanjutnya, muncul potensi-potensi baru di banyak padukuhan. Apabila diurutkan dari utara, yang pertama adalah Cageran Edupark di Padukuhan Cageran. Fungsinya sebagai wisata edukasi anak-anak, seperti wahana permainan jelajah sungai di aliran Sungai Opak yang mengarah ke Kabupaten Klaten.

Ada pula pertanian organik dan kelompok kandang sapi. Objek wisata ini memperkenalkan berbagai jenis tanaman kepada anak-anak sembari bermain air.

Kedua, wisata Sungai Opak Tujuh Bulan. Lokasinya di Padukuhan Dalem. Di sepanjang tepian sungai itu, batu-batu kali menghampar alami menghiasi panggung seni pertunjukan yang terletak tepat di bantaran sungai. Suasana kawasan tepi sungai itu begitu asri dengan rindang pepohonan. Tepat di bawahnya berdiri warung-warung makan dengan menu khas ikan lokal, seperti wader, udang kali, dan sebagainya.

Tempat ini dikembangkan oleh Koperasi Tamanmartani Sejahtera yang bekerja sama dengan warga setempat. Mereka berupaya mengembangkan potensi alam untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Menempati lahan seluas kurang lebih 2 Ha, warga membangun tempat wisata tersebut secara swadaya. Mulai dari membangun jembatan gantung, panggung pertunjukan, instalasi seni dan foto selfie, toilet, pendopo pertemuan, hingga warung-warung makan.

Kali Opak Tujuh Bulan menawarkan wisata alam yang dipadukan dengan wisata keluarga serta wisata edukasi. Selain bisa menikmati suasana pedesaan di tepi sungai yang alami, pengunjung bisa bermain-main air di kolam yang disediakan.

Selain susur sungai, di sini juga disediakan permainan *rock painting* atau melukis batu serta *rock balancing* atau menata batu secara vertikal. Termasuk permainan *outbound*.

Ke selatan, ada Kafe Jamu Kebon di Padukuhan Kebon. Di sini, pengunjung bisa meracik jamu tradisional.

Sementara di Padukuhan Tamanan, potensi unggulannya adalah *nguri-uri budaya jawi*, *mementri wiji*, *nembang macapatan*, dan *unggah ungguh* adat jawa (budi pekerti). Cara berbicara anak dengan orang tua, sebaya, dan lain-lain. Ada pula budaya kenduri. Di tempat ini, tamu diajak masak dan makan bareng. Untuk produk unggulannya adalah dawet yang dipadu dengan aloe vera atau lidah buaya.

Sementara di Padukuhan Jongkangan, objek wisata unggulannya adalah Taman Raja Balitung. Di tempat tersebut terdapat petilasan cerita Candi Kedulan dan Trowulan. Lalu ada Sendang Gilang dan ada situs candinya. Di sini terdapat mata air yang tidak pernah surut. Alirannya sampai ke bawah dan dimanfaatkan untuk pengairan sawah.

Secara geografis, Padukuhan Jongkangan memiliki posisi sangat strategis, karena terletak di sepanjang jalan alternatif yang menghubungkan antara Yogyakarta dan Klaten bagian utara. Jalan ini juga merupakan salah satu jalan alternatif dari Candi Prambanan ke Candi Kedulan, sehingga merupakan salah satu jalan yang sangat ramai dilalui oleh kendaraan.

Secara topografis, Jongkangan terdiri dari daerah ledok sungai, tanah pekarangan dan tempat tinggal, lahan pertanian dan lahan perkebunan. Lahan tersebut terdiri dari tanah hak milik pribadi dan tanah kas desa. Tanah ledok di sepanjang kali biru merupakan tanah yang belum diolah secara maksimal, hanya ditanami aneka tanaman keras, bambu, gayam, bendo, munggur, dan lainnya. Karena produktivitasnya kurang maka lahan itu jarang dirawat, sehingga terkesan kurang bersih.

Di sepanjang sungai terdapat beberapa sumber mata air abadi yang sangat jernih, yaitu sumber air (umbul) Gilang yang airnya digunakan untuk pengairan persawahan di dusun sebelah selatan dusun Jongkangan, dan sumber mata air (belik) yang konon merupakan tempat pemandian Raja Balitung, setelah berburu di semak-semak sekitar Candi Kedulan.

Di sisi utara dusun terdapat banyak sisa-sisa batu candi yang bersejarah di mana menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DIY, batu-batu tersebut merupakan reruntuhan Situs Candi Jongkangan yang keberadaannya sudah terdeteksi sejak tahun 1923.

Wilayah perkampungan Dusun Jongkangan terdiri dari jalan yang cukup lebar, pekarangan, dan rumah tinggal. Beberapa bangunan lama berupa rumah limasan dengan material bangunan kuno masih ada yang dipertahankan pemiliknya, sehingga menarik sebagai bahan penelitian dan dikunjungi.

Sebagian besar rumah tinggal sudah direhab dan direnovasi dengan model modern, mengikuti perkembangan zaman, sehingga layak untuk dimodifikasi sebagai *homestay* dalam program *live in*.

Padukuhan ini memiliki area sawah yang masih cukup luas. Sebagian besar adalah tanah milik pribadi.

Tanaman yang dibudidayakan bervariasi, antara lain padi, jagung, ketela, buah melon, semangka, aneka sayuran seperti cabe, kacang panjang, sawi, terong, dan lain lain.

Sementara kegiatan pertaniannya meliputi membajak sawah dengan alat tradisional dan modern, menanam padi (*tandur*), upacara labuh (syukuran karena tanaman padi mulai tumbuh), dan upacara wiwit (ungkapan syukur tanaman padi siap dipanen) merupakan beberapa kegiatan yang sangat menarik untuk dinikmati masyarakat saat ini.

Posisi persawahan terletak di timur Dusun Jongkangan dan persis di pinggir sempadan jalan alternatif Jogja-Klaten yang sangat ramai. Hamparan sawah yang luas dan latar belakang pemandangan Gunung Merapi di sebelah utara sangat menarik, terutama bila cuaca cerah. Di malam hari bisa digunakan untuk mengamati Gunung Merapi saat erupsi efusif di mana lelehan lava pijar sangat jelas terlihat.

Tanah Kas Desa terletak di beberapa lokasi, antara lain di dekat sungai, di utara dusun, di sebelah timur dusun merupakan tanah yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang pengembangan desa wisata.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Jongkangan adalah petani, peternak, dan sisanya sebagian berprofesi sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, pengrajin. Kelompok swadaya masyarakat terdiri dari kelompok usaha bersama dan kelompok sosial. Kelompok usaha yang berkembang saat ini adalah kelompok peternak ayam kampung, Kelompok Petani Ikan, Kelompok Ternak Sapi dan Kambing, serta Kelompok Tani.

Untuk kelompok sosial antara lain Takmir Masjid, kelompok pengajian Ibu-ibu, kelompok PKK, Karang Taruna, dan lain-lain. Kelompok-kelompok tersebut di atas bersemangat dan bersinergi dalam usaha mewujudkan Jongkangan sebagai tempat tujuan wisata.

Makanan khas di tempat ini adalah jenang tujuh rupa dan pasar tradisional yang digelar sepekan sekali setiap minggu pagi.

Potensi wisata-wisata tersebut tergabung dalam ikatan paguyuban wisata Kalurahan Tamanmartani. Seiring dengan kepengurusan baru dan evaluasi dari tahun sebelumnya, wisata desa masuk bagian BUMDes. Harapannya, wisata Tamanmartani ke depan semakin populer di kancah mancanegara.

Petani di Jongkangan mengembangkan pertanian padi organik dengan penanaman jenis IR-64. Pengembangan padi organik menjadi bagian dalam peluncuran program pengembangan pertanian organik berbasis sumber daya lokal untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat sekitar yang didukung PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWC) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pertanian padi organik bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, terutama dengan hasil pertanian yang berkualitas tinggi.

Budidaya tanaman organik kini mulai dikenal luas masyarakat seiring dengan adanya tren hidup sehat. Banyak pelaku pertanian organik bermunculan seiring dengan pangsa pasar yang semakin terbuka. Tidak hanya karena bernilai ekonomis tinggi, pertanian organik penting untuk perbaikan ekosistem pertanian yang kian rusak terpapar bahan sintetis atau kimiawi, seperti pestisida.

Program tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bahan pangan organik yang selain dapat memberikan manfaat lebih bagi tubuh juga dapat menghasilkan nilai ekonomi tinggi seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan yang sehat.

Dengan adanya pengembangan pertanian padi organik kembali menggairahkan pertanian padi, sekaligus menaikkan produktivitas di Kalurahan Tamanmartani dan Kapanewon Kalasan.

Di masa pandemi Covid-19, kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas produk pertanian, khususnya padi.

Kalurahan Tamanmartani beberapa waktu lalu telah dideklarasikan sebagai Kalurahan Pemajuan Kebudayaan berbasis Teknologi Informatika (TI) atau digital. Selain akan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal, Tamanmartani mengembangkan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengapresiasi langkah Kalurahan Tamanmartani yang berusaha mencari terobosan baru dengan menjadikan wilayahnya sebagai pemajuan budaya serta dikembangkan berbasis TI atau desa pintar.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid, berpandangan, terobosan sangat penting, mengingat hal tersebut dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Di mana pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dan di tingkat akar rumput kegiatan pemajuan kebudayaan juga sudah mulai bergerak sampai ke level desa.

Deklarasi tersebut dilakukan bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2020 lalu. Guna mendukung pengembangan menuju kalurahan pintar dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kalurahan Tamanmartani dengan pihak swasta, dalam hal ini, PT Ambara Duta Santi. Kerja sama untuk mendukung penyediaan dan pelayanan jasa internet.

Kian hari, Tamanmartani terdapat banyak sekali objek kebudayaan, baik yang masih lestari dan berkembang maupun yang sudah punah. Objek-objek itu berupa cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda.

Melalui program berbasis TI pihak swasta dapat menyediakan infrastruktur internet yang dikerja sama-kan dengan BUMDes. Termasuk memberikan layanan internet kepada masyarakat dengan harga murah dan keuntungan akan kembali ke masyarakat.

Adanya infrastruktur mendukung *good governance* karena akan ada beberapa aplikasi yang bisa diterapkan misalnya aplikasi pelayanan publik, aplikasi pendataan penduduk, aplikasi pendidikan, aplikasi pengembangan potensi budaya.

Sedangkan terkait pemajuan budaya, bentuk pengembangannya akan lebih luas dan tidak sebatas pada kesenian. Sesuai dengan pengertian budaya dalam

Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sangat luas. Bukan hanya kesenian. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang meliputi seluruh perikehidupan masyarakat. Dan semua itu dikembangkan di Tamanmartani.

Dua Periode Kepemimpinan

Setelah berakhir masa periode kepemimpinan yang pertama, saya berkeputusan untuk kembali maju ke pemilihan lurah periode selanjutnya. Alasan saya untuk kembali mencalonkan diri, karena dorongan dari berbagai unsur warga masyarakat, seperti kelompok tani, dan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Saya bermaksud melanjutkan dan menyelesaikan program-program yang telah dibuat pada periode sebelumnya. Di periode kedua, saya berjanji akan menyempurnakan program yang telah dibuat sebelumnya.

Program utamanya yakni akan mewujudkan *smart village* atau desa yang cerdas. Selain itu, akan mengusahakan Kalurahan Tamanmartani sebagai penyangga wisata untuk Candi Prambanan.

Berbagai cara pun telah dilakukan, salah satunya dengan menggandeng Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri). Dengan kerja sama dalam bentuk pengembangan jasa penginapan jenis *home stay*.

Sebanyak 12 *homestay* dibuka di rumah warga untuk menampung wisatawan yang berkunjung ke Candi Prambanan.

Dengan bantuan pembangunan *homestay* ini bisa memberdayakan sekaligus merangsang perputaran roda perekonomian masyarakat setempat. Karena, lokasi Kalurahan Tamanmartani cukup strategis, hanya berjarak sekitar 500 meter di sisi barat kompleks Candi Prambanan.

Pengelolaan 12 *homestay* yang masing-masing terdiri dua kamar tersebut nanti diserahkan kepada koperasi bentukan warga. Nantinya, 10 persen dari total pendapatan bisa dimanfaatkan warga untuk pengembangan usaha. Selain mendukung iklim pariwisata, bantuan ini bertujuan mencetak pengusaha di tingkat desa agar mereka tidak lagi berkubang dalam kemiskinan.

Tak hanya penginapan, Damandiri juga membangun satu warung untuk menunjang desa wisata setempat. Semangatnya adalah memberdayakan masyarakat pedesaan agar kesejahteraannya bisa meningkat.

Saya optimis warga Tamanmartani bakal mengelola *homestay* dengan profesional. Saya berharap sesuai dengan tujuan awal, yakni bantuan pengembangan *homestay* bisa meningkatkan kesejahteraan warga.

Terkait biaya sewa, koperasi warga menyesuaikan pasar wisatawan yang berkunjung ke Candi Prambanan.

Program kedua yang penting untuk dipertahankan adalah pengentasan kemiskinan dengan One Day One Hundred. Upaya menekan angka kemiskinan butuh kerja sama semua pihak. Hal ini setidaknya telah dibuktikan pemerintah dan masyarakat Kalurahan Tamanmartani yang bersinergi menggulirkan program One Day One Hundred.

Program ini berupa pengumpulan iuran sukarela dari warga untuk disumbangkan kepada lansia terlantar dalam wujud makanan. Melalui aksi sosial ini, setiap hari ada 60 lansia yang dapat dibantu.

Caranya sederhana yakni dengan mengumpulkan uang recehan dari warga, kemudian diberikan dalam bentuk makanan kepada 60 lansia miskin di Kalurahan Tamanmartani. Penyalurannya dibantu rekan-rekan dari Karang Taruna.

Besaran dana tersebut tidak ditentukan. Warga yang bersedia dapat menyumbang seikhlasnya. Dari aksi

kemanusiaan ini bisa terkumpul dana dari masyarakat rata-rata sebesar Rp2 juta, yang dikumpulkan tiap bulan oleh pemuda Karang Taruna.

Dana itu kemudian dialokasikan untuk memasak menu yang diolah sendiri oleh warga desa setempat. Setiap hari, para lansia mendapat jatah bantuan satu kali menu makan siang. Selain swadaya masyarakat, program One Day One Hundred juga didukung anggaran CSR dari beberapa perusahaan yang ada di Kalurahan Tamanmartani.

Saya berharap, ke depan bisa lebih banyak lansia yang terjangkau program ini. Meski sudah ada program keluarga harapan (PKH) yang mengkover lansia, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dalam sebulan, sehingga butuh partisipasi kepedulian dari warga sekitar.

Sebenarnya, lansia yang butuh bantuan ada lebih dari 60 orang, tapi kemampuan program sementara baru sejumlah itu.

Munculnya berbagai inovasi program sosial seperti One Day One Hundred, tidak terlepas dari peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di Kalurahan Tamanmartani. Sebagian dari mereka sudah diikutkan kegiatan diklat.

Program unggulan lain, yakni pelopor pembuatan pupuk murah. Sejak tahun 2015, saya telah mengajak warga untuk membuat pupuk murah yang terbuat dari limbah kotoran sapi dan sampah di wilayah Tamanmartani.

Ide pembuatan pengolahan limbah menjadi pupuk murah ini karena adanya keprihatinan mahalannya harga pupuk dan keinginan petani di Tamanmartani untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia.

Pupuk hasil olahan kotoran sapi dan sampah dijual murah kepada para petani dan sebagian ada yang dijual ke luar wilayah. Harga pupuk ini sangat terjangkau.

Pengolahan pupuk limbah dikerjakan oleh para pemuda Karang Taruna Kalurahan Tamanmartani dengan bantuan peralatan dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2014.

Limbah kotoran sapi dan sampah dikumpulkan dari kandang sapi seluruh warga di Dusun Tamanan Pabrik, kemudian dilakukan fermentasi terlebih dahulu agar kering dan tidak berbau. Proses selanjutnya, kotoran yang sudah kering dimasukkan ke dalam enam mesin, termasuk mesin penggiling.

Dari seluruh proses tersebut akan menghasilkan butiran pupuk, setelah itu dilakukan pengemasan

dalam karung masing-masing seberat 20 kilogram. Seluruh proses menggunakan mesin hingga proses pengepakan. Mesin pengolahan pupuk organik ini mampu memproduksi satu ton pupuk organik dengan delapan jam kerja sehari.

Diharapkan dengan produksi itu kebutuhan pupuk murah tidak hanya dinikmati warga Tamanmartani, namun bisa lebih luas lagi memasarkannya ke sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman.

Sebelumnya, mesin-mesin pengolah pupuk sempat mangkrak, karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan warga. Namun berkat keinginan yang kuat dari warga dan Karang Taruna, akhirnya mereka belajar untuk dapat mengoperasikannya, sehingga saat ini banyak memberi manfaat ekonomi bagi warga.

Tidak kalah bermanfaat, Tamanmartani pada periode kepemimpinan pertama saya juga berusaha sedemikian rupa untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan warga. Tamanmartani yang melek akan pentingnya berwirausaha.

Kewirausahaan merupakan kegiatan yang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Belum meratanya pemahaman tentang pentingnya berwirausaha bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, dan pada

akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi pedesaan.

Karena itu, perlu adanya suatu gebrakan agar mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat ke arah perekonomian yang lebih baik. Infrastruktur yang kurang memadai ditambah dengan minimnya sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor pemicu tidak meratanya pemahaman tentang kewirausahaan di Indonesia.

Umumnya kewirausahaan sering dijumpai dalam dunia bisnis, namun akhir-akhir ini berkembang dari pelaku kewirausahaan. Kewirausahaan bukan hanya milik wiraswasta atau usahawan, tetapi kewirausahaan dapat dimiliki semua orang, tentunya jika ada kemauan keras, sikap optimis, dan kreativitas yang mampu membuat inovasi-inovasi baru.

Mengingat banyaknya minat warga Tamanmartani yang gemar akan burung berkicau dan penangkaran, Kalurahan Tamanmartani berinisiatif menggelar penyuluhan ternak burung berkicau. Kegiatan tersebut adalah sebagai salah satu cara untuk mengembangkan minat masyarakat yang mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan dalam bidang hobi dan penangkaran burung berkicau.

Dalam kegiatan tersebut mendatangkan empat narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, seperti perwakilan juri kontes burung berkicau Kotrek, peternak, sekaligus juri dan penulis buku seputar burung *love bird*, Budi Prawoto; MC sekaligus *entrepreneur* dunia burung, Puguh Liontin; serta dokter hewan spesialis burung, Drh. Edi Boedi Santosa.

Pada kesempatan itu masing-masing narasumber memberikan wawasan dan juga pengembangan untuk manajemen sebagai upaya untuk dapat memberikan keuntungan yang optimal agar dapat memberi manfaat yang lebih bagi masyarakat Tamanmartani.

Selain membekali warga dengan beberapa materi seputar kegiatan hobi dan penangkaran burung, di akhir acara, Kalurahan Tamanmartani juga memberikan bantuan langsung berupa sangkar untuk beternak kepada warga.

Adalah sebuah gebrakan untuk mengumpulkan para peternak, calon peternak, dan pencinta burung dan mengikuti penyuluhan ternak burung berkicau.

Mengapa memilih pelatihan peternakan dengan topik burung berkicau, khususnya *love bird* dan kenari, karena banyaknya minat warga Tamanmartani yang gemar akan burung berkicau dan penangkaran.

Kenapa burung? Pertama, karena saya melihat di Tamanmartani banyak penggemar burung. Beberapa ada yang sudah jadi peternak, ada yang sudah cukup lama, ada yang baru mulai, ada yang baru punya keinginan tapi masih bingung bagaimana memulainya. Bagi yang sudah mulai juga mengaku pengetahuannya secara umum masih kurang.

Kegiatan tersebut sebagai salah satu cara untuk mengembangkan minat masyarakat. Tujuannya, untuk meningkatkan potensi dan kemampuan dalam bidang hobi dan penangkaran burung berkicau.

Pihak Kalurahan berharap, dengan adanya penyuluhan penangkaran burung berkicau mempunyai harapan dan titik terang menuju ke arah yang lebih baik dari segi ilmu pengetahuan maupun kesejahteraan serta untuk ke depannya dapat berjalan dengan lancar.

Beberapa waktu lalu, saya juga dilantik sebagai Ketua Paguyuban Surya Ndadari beserta 31 anggota sebagai pengurus. Paguyuban tersebut sebagai wadah pengoptimalan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Keberadaan paguyuban ini dapat menjadi wadah untuk saling bertukar informasi dan diskusi antar-Lurah, baik untuk perbaikan Kalurahan yang lebih berkualitas, perbaikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus

menjadi wadah berbagi dan mencari solusi bersama dalam memecahkan suatu permasalahan.

Selain itu, dengan adanya Paguyuban Suryo Ndadari, akan terjalin dengan baik komunikasi antara pihak Kalurahan dan Kabupaten, sekaligus sebagai tukar tempat ilmu di antara Lurah se-Kabupaten Sleman. Diharapkan, hak dan kewajiban kepala desa dan perangkat desa maupun masyarakat dapat diperjuangkan.

Sebagai misal, jika ada anggota masyarakat yang memiliki potensi yang belum terlihat maka menjadi kewajiban pimpinan desa untuk memberi motivasi dan menggali potensi tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih optimal dalam memberdayakan potensinya dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraannya.

Perangkat Kalurahan saat ini memiliki kemampuan yang memadai. Misalnya, kemampuan penggunaan teknologi informasi yang sudah bagus. Harapannya dapat mewujudkan cita-cita kabupaten dan membentuk Smart Village di Kabupaten Sleman.

Kalurahan Terbaik Se-Kabupaten Sleman 2021

Upaya Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman dalam memutus penyebaran penularan Covid-19 di wilayah tersebut membuahkan hasil yang membanggakan.

Beberapa waktu lalu, Kalurahan Tamanmartani berhasil meraih juara terbaik pertama dalam lomba Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Sleman Tahun 2021.

Kegiatan Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDesKel) Tingkat Kabupaten pada 2021 ini diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Sleman.

Lomba yang mengangkat tema ‘Desa dan Kelurahan Bangkit, Sehat, Maju dan Sejahtera di Masa Pandemi Covid-19’ ini diikuti oleh seluruh perwakilan Kalurahan di tiap Kapanewon yang ada di Sleman.

Lomba diadakan berdasarkan Permendagri No.81/2015 tentang EPDesKel. Tujuannya untuk mengetahui capaian yang ada di Kalurahan selama kurun waktu satu tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, serta kemasyarakatan.

Lomba ini mengundang 17 Kalurahan yang ditunjuk untuk mewakili 17 Kapanewon. Masing-masing Kalurahan mengirimkan 5 orang perwakilan yang terdiri Lurah, pamong, BPK, dan Tim Penggerak PKK Kalurahan.

Dari jumlah tersebut, dipilih 5 terbaik, dan Kalurahan Tamanmartani meraih terbaik pertama serta berhak memperoleh uang pembinaan Rp110 juta. Juara terbaik kedua diraih oleh Kalurahan Widodomartani dan memperoleh uang pembinaan Rp60 juta. Juara terbaik ketiga adalah Kalurahan Sardonoarjo. Kalurahan ini memperoleh uang pembinaan Rp30 juta.

Untuk harapan satu diraih Kalurahan Umbulharjo, Cangkringan, dengan uang pembinaan Rp25 juta dan harapan 2 Kalurahan Madurejo, Prambanan, dengan uang pembinaan Rp15 juta.

Raihan prestasi tersebut bukan untuk Kalurahan namun dipersembahkan untuk warga masyarakat Tamanmartani. Kemenangan ini dapat mendorong warga untuk

tetap menjaga semangat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Pada saat awal kasus Covid-19 masuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, saya berinisiatif membagikan gerbang disinfektan untuk tiap dusun di Tamanmartani. Pembagian gerbang disinfektan kami bagikan untuk tiap dusun dengan jumlah 20 buah.

Di balik pembagian gerbang disinfektan, masyarakat menjadi mempunyai rasa untuk mengamankan wilayahnya. Nilai yang diambil bukan terus disemprot terus bebas dari Covid-19, tapi dengan adanya gerbang disinfektan tersebut masyarakat bangkit untuk menjaga kawasan. Kebersamaan inilah yang penting. Saya terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka merasa aman, salah satunya adalah dengan gerbang disinfektan.

Setelah itu, saya membentuk posko Covid-19 untuk memantau setiap orang yang keluar dan masuk di tiap-tiap dusun. Posko Covid-19 memberikan akses keluar masuk bagi warga, baik itu warga maupun orang dari luar dusun, karena pada waktu itu seluruh warga menutup akses masuk di wilayahnya.

Selain itu, dengan adanya posko Covid-19, seluruh warga, baik yang keluar dan masuk bisa terdata. Jadi,

Kalurahan bisa memantau seluruh warga masyarakat melalui posko tersebut. Jika ada warga yang sakit namun rumahnya tidak memungkinkan untuk tempat isolasi, pihak Kalurahan menyarankan melakukan isolasi di tempat isolasi yang telah disediakan di tiap desa.

Sampai sekarang, posko Covid-19 masih tetap berjalan dengan baik. Warga pun mendapat bantuan dari relawan Rescue, dan anggota Linmas. Relawan rescue rutin melakukan penyemprotan disinfektan. Jadi, jika ada laporan bahwa warga Tamanmartani ada yang terkonfirmasi positif maka rumahnya langsung disemprot oleh relawan Rescue, sementara untuk penjagaannya dilakukan oleh anggota Linmas.

Petugas Linmas juga sering melakukan operasi simpatik. Misalnya, membagikan masker. Jadi, sekali operasi biasanya para anggota Linmas membagikan sampai lima dus masker untuk warga masyarakat.

Sementara dari pihak Kalurahan membantu bahan makanan untuk seluruh anggota keluarga yang melakukan karantina di rumah mereka. Bahan makanan ini diperuntukkan bagi korban dan seluruh anggota keluarganya. Jadi, meskipun di satu rumah yang terkonfirmasi positif hanya satu, tapi di rumah tersebut ada lima orang, Kalurahan mempersiapkan bantuan tersebut untuk lima orang.

Bantuan tersebut terdiri dari 3 kilogram beras untuk satu orang, 1 kilogram telur ayam, dan vitamin seperti vitamin C dan E. Sementara untuk sayur-sayuran swadaya dari masyarakat sekitar. Alhamdulillah, setiap warga di Kalasan sudah berbudaya seperti itu.

Kalurahan menggandeng Koperasi Tamanmartani yang dibantu oleh Yayasan Damandiri untuk menyalurkan bantuan 500 paket sembako kepada 500 warga di 22 padukuhan di Kalurahan Tamanmartani yang terdampak Covid 19. Setiap paket sembako senilai Rp100 ribu, seperti beras, minyak Goreng, dan gula pasir.

Bantuan sosial ini tepat sasaran, karena daftar nama yang masuk dan dikirimkan kepada koperasi merupakan daftar nama dari Tim Penanggulangan Kemiskinan atau TPK yang ada di tiap-tiap pedukuhan.

Dengan adanya penyaluran bantuan paket Sembako kepada warga terdampak Covid-19 dan warga kurang mampu tersebut dapat membantu mengurangi beban mereka, meskipun hanya senilai Rp100 ribu dan tidak bisa rutin setiap bulan.

Warga yang mendapatkan paket sembako tersebut pembagiannya diatur per jam di setiap padukuhan yang sesuai prosedur protokol kesehatan sehingga tidak menimbulkan antrean.

Selain itu, saya terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada warganya agar mereka disiplin menggunakan masker, sebab edukasi dan sosialisasi memakai masker masih sebatas pengetahuan. Hal yang paling penting adalah internalisasi pengetahuan tersebut. Kalau sudah terjadi akan menjadi kebiasaan.

Saya mengimbau warga agar selalu saling mengingatkan bahwa memakai masker dapat memberikan perlindungan dari penularan Covid-19.

Edukasi itu harus terus-menerus sampai masyarakat merasa beruntung dan bermanfaat untuk melindungi dirinya dan orang lain, sampai di masyarakat kita muncul pandangan bahwa orang yang tidak pakai masker itulah yang tidak keren.

Saya juga membuat shelter Covid-19 di Kantor Kalurahan. Shelter ini untuk memberikan fasilitas isolasi bagi pasien positif Covid-19 tanpa gejala. Shelter disiapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses isolasi atau karantina mandiri yang dilakukan di wilayah Tamanmartani.

Dari hasil evaluasi, ternyata karantina mandiri atau isolasi di rumah masih memiliki potensi untuk adanya penularan, dikarenakan kontrol yang kurang ketat, sehingga disiapkan shelter Covid-19.

Contohnya, kontrol yang kurang ketat dari masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah, yakni sering ditemukannya mereka yang masih melakukan kontak dengan keluarga dekat yang berada di sekitarnya. Hal tersebut dapat menjadi potensi adanya penularan atau klaster keluarga.

Shelter Covid-19 memiliki fasilitas tujuh kamar yang dilengkapi dengan kasur, kamar mandi, peralatan mandi, dan kebutuhan sehari-hari. Shelter memanfaatkan bangunan yang sebelumnya dipakai oleh lembaga-lembaga, seperti BKM, Bumdes, dan BPD dengan fasilitas sementara, yaitu tujuh kamar dan dilengkapi internet gratis.

Secara teknis, masyarakat yang masuk dalam kategori orang tanpa gejala atau OTG akan dipindah ke shelter Covid-19 berdasarkan dari hasil pemantauan Satgas Covid-19 tingkat Padukuhan. Saat ini, Pemerintah terus berupaya melakukan langkah nyata agar dapat menekan penularan Covid-19 di Sleman.

Sebelumnya, pada tahun 2018, Kalurahan Tamanmartani dinobatkan sebagai Kalurahan terbaik dalam realisasi pengelolaan dana desa. Penilaian tersebut dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Berdasarkan data yang telah dihimpun BPK RI dalam realisasi Kabupaten Sleman terkait pengelolaan dana desa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang mencapai rata-rata angka 100 persen.

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Helmizar pada waktu itu mengatakan jika pihaknya sengaja datang untuk mencari informasi dan data mengenai pengelolaan dana desa di Sleman karena keberhasilan Pemkab Sleman selama ini. Sampling di Kabupaten Sleman menjadi tujuan pertama karena realisasinya dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mencapai angka rata-rata 100 persen.

Kepemimpinan Transformasional

Lain pemimpin, lain pula kebijakannya. Lain daerah, lain pula visi yang dibangun pemimpinnya. Bila umumnya Kepala Desa atau Lurah masih sangat kental karakter feodalnya, di Tamanmartani, semua lapisan warganya dimobilisasi Pemerintah Kalurahan menuju cita-cita bersama.

Intinya, saya sebagai Lurah tidak harus terlalu dikenal publik. Keberhasilan kepemimpinan desa itu didukung oleh semua pihak. Jadi, semuanya berkontribusi, semuanya bisa tampil.

Ada yang bilang, gaya kepemimpinan seperti ini disebut sebagai gaya kepemimpinan transformasional lantaran memberi ruang yang cukup kepada setiap orang yang dipimpin untuk terus berkembang dan fokus pada tujuan pembangunan.

Penekanan gaya kepemimpinan transformasional terbukti mujarab, karena warga Tamanmartani, meski bertahap, dapat menerima ide perubahan besar, yang selama ini sulit tumbuh dalam lingkungan tertutup. Tanpa gaya kepemimpinan demikian, rasanya mustahil membangun Tamanmartani dengan semangat gotong royong yang tak pernah padam nan saling melengkapi.

Bernard Morris Bass, seorang psikolog berkebangsaan Amerika Serikat di bidang studi kepemimpinan dan perilaku organisasi, berpandangan bahwa para pengikut pemimpin transformasional memiliki kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat terhadap sang pemimpin, serta termotivasi melakukan lebih dari apa yang awalnya diharapkan.⁴

Diterbitkan Lawrence Erlbaum Associates yang beralamat di Mahwah, New Jersey, pada 2005, Bass menulis buku berjudul *Transformational Leadership* edisi kedua. Jauh sebelumnya, pada 1949, Guru Besar terkemuka di School of Management di Binghamton University tersebut telah menulis karya berjudul *Comparison of the Leaderless Group Discussion and*

4. Yukl, Gary. 2010. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Indeks. h. 313.

the Individual Interview in the Selection of Sales and Management Trainees, dan diterbitkan Ohio State University. Sebuah bukti kematangan Bass dalam setiap pembahasan kepemimpinan.

Bagaimanakah ciri-ciri kepemimpinan transformasional?⁵ Pertama, pengaruh ideal (*idealized influence*). Artinya, pemimpin memberikan visi dan misi, memunculkan rasa bangga, serta mendapat penghormatan dan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya.

Pengaruh ideal identik dengan pemimpin karismatis. Pengikut sungguh yakin pada pemimpinnya. Mereka bangga bisa bekerja dengannya, serta memercayai kapasitas pemimpin dalam mengatasi setiap masalah.

Kedua, motivasi inspirasional (*inspirational motivation*). Pemimpin mampu mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menyampaikan visi bersama secara menarik dengan simbol-simbol. Tujuannya, memfokuskan upaya orang-orang yang dipimpin dan menginspirasi bawahan untuk mencapai kemajuan penting bagi organisasi.

Ketiga, stimulasi intelektual (*intellectual stimulation*). Pemimpin mampu meningkatkan kecerdasan orang-orang yang dipimpinnya untuk semakin kreatif dan inovatif,

5. Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat. h. 91.

rasional, serta mampu memecahkan masalah secara cermat.

Keempat, pertimbangan individual (*individualized consideration*). Pemimpin memberikan perhatian pribadi, memperlakukan orang per orang yang dipimpin secara individual sebagai seorang individu dengan kebutuhan, kemampuan, dan aspirasi berbeda, serta melatih dan memberikan saran. Ia mendampingi serta memonitor setiap orang yang ia pimpin dan menumbuhkan peluang.

Saat pelantikan periode pertama kepemimpinan (2012-2018), pada Rabu, 17 Oktober 2012, Bupati Sleman Sri Purnomo berharap adanya rekonsiliasi semua warga. Hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tentu saja tidak memuaskan semua pihak.

Saat proses pemilihan kepala desa, warga masyarakat boleh saja berbeda pendapat. Namun, setelah Kepala Desa terpilih dilantik, semua friksi harus segera diakhiri, ucap Bupati Sri ketika itu.

Pesan yang sarat makna. Bupati Sri Purnomo tampak sangat memahami situasi pasca-Pilkades yang bisa saja berbuntut panjang, bila tidak dilakukan rekonsiliasi. Sebuah tantangan krusial bagi Lurah, karena kini, setelah terpilih menjadi pemimpin Tamanmartani, harus dapat merangkul semua kalangan yang kemarin, saat pemilihan, bisa jadi memiliki pendapat berbeda.

Sesuai arahan Bupati Sri Purnomo, sebagai Kepala Desa terpilih, saya pun menyesuaikan diri pada norma dan etika keaparatan pemerintah desa dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebaik-baiknya.

Dalam mengemban amanah dan tugas sebagai pucuk pimpinan di Tamanmartani, saya berusaha melayani seluruh lapisan masyarakat serta mampu menumbuhkan aktivitas masyarakat.

Untuk memberdayakan warga dengan berbagai aktivitas, Pemerintah Desa harus mampu menciptakan sumber-sumber ekonomi yang bergerak di masyarakat. Dengan adanya sumber ekonomi, akan meningkatkan kesejahteraan warga. Terlebih, di Tamanmartani, banyak sekali potensi ekonomi yang dapat diberdayakan dan dikembangkan untuk kesejahteraan warga.

Ketika seremonial pelantikan periode pertama kepemimpinan saya, Bupati Sri Purnomo juga berpesan, sebagai wilayah yang berdekatan langsung dengan obyek wisata Candi Prambanan, Pemerintah Kalurahan Tamanmartani diharapkan dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan warga.

Untuk itu, Pemerintah Desa dapat mendorong warga, terutama generasi muda untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Misalnya, berkreasi memproduksi berbagai

cinderamata, jasa wisata, serta mengembangkan kreasi budaya yang dapat mendukung keberadaan obyek wisata Candi Prambanan.

Pemerintah Desa, sambung Bupati, dituntut lebih dinamis dalam mendorong warga mengembangkan kreativitasnya. Pemerintah Desa dapat mengembangkan jejaring kerja sama dengan berbagai instansi teknis, lembaga perguruan tinggi, serta swasta, yang memiliki kepedulian pada pemberdayaan warga desa. Tentunya dengan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku.

Oleh karenanya, pada periode pertama, Tamanmartani kemudian membuat program kebersihan lingkungan. Bertumpu pada ‘*Sapta Pesona*’, pendukung wisata yang harus disiapkan adalah keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan. Kenyamanan inilah yang dibangun terlebih dahulu, bukan destinasi.

Saya tidak langsung *jleg* membuat destinasi, tapi tata lingkungannya dulu. *Aja nganti ana banjir* (Jangan sampai ada banjir).

Kembali ke pembahasan tentang kepemimpinan transformasional, karakteristik kepemimpinan sangatlah penting. Karakteristik pemimpin transformasional

dijelaskan oleh Fred Luthans, seorang profesor manajemen dengan spesialisasi perilaku organisasi di Universitas Nebraska, Lincoln.⁶

Pemimpin mengidentifikasikan dirinya sebagai agen perubahan, mendorong keberanian dan pengambilan risiko, percaya pada orang-orang yang ia pimpin, dilandasi oleh nilai-nilai, seorang pembelajar sepanjang hidup (*lifelongs learners*). Selain itu, pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk mengatasi kompleksitas, ambiguitas, dan ketidakpastian. Terakhir, ia berkarakteristik seorang pemimpin yang visioner.

Awal kepemimpinannya, saya jujur mengaku bahwa pada kenyataannya, warga Tamanmartani tidak akan mungkin bisa bersaing dengan warga Jakarta, misalnya. Karena, secara SDM dan secara mentalitas, lain.

Kalau orang Jakarta katakanlah kalau bangun jam 05.00, berangkat kerja jam 06.00, pulang jam 10.00, tidur jam 11.00, itu sudah biasa. Warga saya tidak bisa seperti itu. Kebanyakan, warga Tamanmartani terbiasa di zona nyaman, biasa tidak banyak tuntutan, tidak seperti orang kota.

6. Triantoro Safaria. 2004. *Kepemimpinan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. h. 63.

Saya pun bertekad untuk memajukan Tamanmartani, dengan keadaan demikian. Saya berusaha menggandeng warga agar sama-sama selamat di masa depan. Berpikir dan bekerja bersama dengan landasan yang kuat. Sebab, dibutuhkan visi, pada rentang satu atau dua dekade akan seperti apa warga Tamanmartani, sementara dunia semakin global.

Pemerintah Kalurahan lantas membangun inisiasi, bagaimana berkreasi ekonomi, tanpa memaksa SDM warga Tamanmartani seperti warga Jakarta. Untuk mengikuti perkembangan zaman, salah satunya adalah menjadikan Tamanmartani sebagai desa dengan kapasitas wisata, yakni menjadi tuan rumah dengan lingkungan yang indah dan nyaman dikunjungi.

Lha itu *kan* duit bakal datang. Tidak perlu ke Jakarta *golek upo* (bekerja). Cukup di desa sendiri. Jadi, intinya membuat lingkungan yang terlihat indah, dari segala sisi nyaman.

Betapa setiap kepemimpinan memang memiliki prinsip-prinsip kepemimpinan, pun dengan kepemimpinan transformasional. Erik Rees, seorang pastor Gereja Saddleback di Lake Forest, California, menuturkan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional.⁷

7. Rees, Erik. 2001. 'Seven Principles of Transformational Leadership: Creating A Synergy of Energy'. Diakses dari cicministry.org tanggal 14 Mei 2021.

Pertama, simplifikasi. Keberhasilan kepemimpinan diawali dengan sebuah visi yang menjadi cermin dan tujuan bersama. Kemampuan serta keterampilan dalam mengungkapkan visi secara jelas, praktis, dan transformasional menjawab langkah apa yang akan dilakukan.

Kedua, motivasi. Kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari setiap orang yang terlibat terhadap visi merupakan hal kedua yang perlu dilakukan. Pada saat pemimpin transformasional dapat menciptakan sinergitas organisasi, berarti ia dapat mengoptimalkan, memotivasi, dan memberi energi kepada setiap pengikutnya.

Praktisnya, dapat berupa tugas atau pekerjaan yang betul-betul menantang serta memberikan peluang bagi mereka pula untuk terlibat dalam sebuah proses kreatif, baik saat memberikan usulan maupun ketika mengambil keputusan pemecahan masalah. Hal ini memberikan nilai tambah bagi mereka.

Ketiga, fasilitasi, dalam pengertian kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi pembelajaran yang terjadi di dalam organisasi secara kelembagaan, kelompok, atau pun individual. Hal ini berdampak pada semakin bertambahnya modal intelektual dari setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Keempat, mobilisasi, yaitu pengerahan semua sumber daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat setiap orang yang terlibat di dalamnya dalam mencapai visi dan tujuan. Pemimpin transformasional selalu mengupayakan pengikut yang penuh dengan tanggung jawab.

Kelima, siap siaga, yaitu kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri sendiri dan menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif.

Keenam, tekad bulat untuk selalu sampai pada akhir, yakni menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. Untuk itu, perlu didukung oleh pengembangan disiplin spiritualitas, emosi, fisik, serta komitmen.

Untuk membangun Tamanartani, saya mengolah potensi ‘penta helix’, yakni komunitas lokal, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan media. Kelimanya bersinergi, saling menguatkan, dan saling melengkapi.

Pada zaman ini, konsep ‘triple helix’ dengan menggunakan relasi universitas, industri, dan pemerintah, tidak lagi relevan. Pun dengan konsep ‘quadruple helix’ yang menambahkan komponen warga lokal.

Strategi pembangunan Tamanmartani dengan bertumpu pada kolaborasi penta helix diharapkan efektif dan tepat guna. Tanpa perlu banyak *woro-woro* cukup dengan merencanakan kunjungan pariwisata, dukungan

dari warga akan terbangun semua dengan sendirinya. Sebab, wisata membutuhkan jalan yang layak, kondisi tertib dan aman, infrastruktur memadai. Wisata bila dimiliki bersama oleh warga akan menimbulkan kegotongroyongan secara otomatis. Terlebih, di desa, orang terbiasa tidak hidup sendiri-sendiri, bukan seperti orang kota.

Lebih operasional, pemimpin transformasional jelas lekat dengan perubahan.⁸ Pemimpin-pemimpin ini membantu orang-orang yang ia pimpin agar dapat melakukan perubahan positif dalam setiap aktivitas mereka. Perubahan itu sering kali berskala besar dan dramatis.

Tindakan paling luas yang dilakukan pemimpin transformasional adalah mengubah kultur organisasi. Nilai, sikap, dan atmosfer organisasi pun diubah dari kultur birokratis yang kaku dan sedikit mengambil risiko menjadi kultur baru yang luwes dan produktif. Orang-orang lantas mampu bergerak lebih dinamis serta tidak terlalu dibatasi oleh aturan dan regulasi.

Pemimpin transformasional membuat anggota kelompok sadar akan arti penting imbalan tertentu dan

8. Dubrin, Andrew J. 2005. *Leadership*. Terj. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media. h. 143-145.

bagaimana cara mendapatkannya. Ia mungkin menyebutkan kebanggaan yang akan dirasakan orang-orang yang ia pimpin jika lembaga dinomorsatukan.

Para pemimpin transformasional membantu anggota kelompok untuk melihat gambaran yang lebih besar, demi kebaikan tim dan organisasi. Secara bertahap, pemimpin membuat anggota sadar bahwa tindakan mereka memberi kontribusi pada tujuan yang lebih luas ketimbang sekadar memenuhi kepentingan diri sendiri.

Pemimpin-pemimpin itu membantu orang-orang yang mereka pimpin untuk mencari pemenuhan diri, yakni membantu orang lain untuk tidak hanya berfokus pada kesuksesan sekadarnya, tetapi juga pada usaha mencari pemenuhan diri.

Mereka memberi pemahaman kepada orang lain tentang keadaan urgen. Untuk menciptakan transformasi, pemimpin mengumpulkan personel kritis, lalu melibatkannya dalam diskusi urgensi perubahan.

Tak lupa, pemimpin transformasional juga mengejar kejayaan. Tindakan transformasional tertinggi adalah membuat orang lain bersemangat untuk melakukan kerja keras, demi kebesaran dan kejayaan organisasi.

Saya melakukan semua itu untuk sebuah kepentingan bersama, kesejahteraan warga Tamanmartani. Perubahan diupayakan bertahap dari satu titik ke titik lain, untuk menyemai semangat pantang menyerah sebagai entitas kalurahan yang benar-benar mengandalkan sumber daya lokal.

Pola kepemimpinan transformasional terbukti berhasil memunculkan kinerja dengan nilai yang jauh melebihi ekspektasi. Pada waktu yang sama, setiap warga tidak lantas merasa terbebani. Kepemimpinan tersebut dapat dikatakan menggerakkan warga sedemikian rupa untuk mau dan rela memunculkan kebajikan dan kapabilitas terbaiknya di dalam proses penciptaan nilai.

Bekerja dengan gairah dan semangat kerja tinggi secara berkesinambungan tampak pada kepemimpinan Tamanmartani. Banyak personel yang berkembang menjadi pemimpin di lingkungannya masing-masing. Saya berupaya konsisten melahirkan pemimpin baru di segala lini kehidupan Kalurahan Tamanmartani.

Saya biasa bersikap proaktif dalam banyak hal. Tidak hanya memaksimalkan kerja orang-orang yang dipimpin, tetapi juga mengembangkan kehidupan mereka. Dalam kadar istimewa, tak segan saya benar-benar memerhatikan kebutuhan individual warga kalurahan. Terlebih, bagi warga yang terus konsisten bersama

Pemerintah Kalurahan berkreasi mengembangkan potensi yang ada.

Dalam membangun kepemimpinan, saya terus berusaha memahami status, posisi, dan harapan orang-orang yang saya pimpin. Saya peduli pada harapan, kebutuhan, dan aspirasi pengembangan diri mereka. Kepedulian secara pribadi, bagi saya, dilakukan dengan memerhatikan kebutuhan dan harapan warga, karena setiap mereka adalah pribadi yang unik.

Meski tampak dominan, saya terbiasa mendengarkan dengan saksama permasalahan orang per orang dan pada saat yang sama, mendorong mereka untuk percaya diri agar mampu keluar dari masalah yang dihadapi. Problem umum di tingkat warga, seperti berhadapan dengan rentenir, keberhasilan panen, hingga penyelesaian administrasi keluarga menjadi rujukan utama kepemimpinan Tamanmartani.

Tak sekali dua kali, saya turun langsung menyelesaikan persoalan warga, bahkan sanggup menjadi jaminan, selama tidak berseberangan dengan hukum. Aksi membela kepentingan warga tersebut adalah ejawantah kepemimpinan transformasional yang selama ini inern dalam setiap gerak Pemerintahan Kalurahan Tamanmartani. Ia peka pada beban pekerjaan orang-orang yang ia pimpin. Beban yang jangan sampai

berlebihan, dan pada akhirnya, membuat pekerjaan menjadi kurang berkualitas, bahkan terbengkalai.

Secara moral, kepemimpinan Tamanmartani mampu 'memanusiakan manusia'. Maka wajar bila kepercayaan diri dan harga diri warga kemudian tumbuh dan terus menguat. Perlakuan dan komunikasi kepada warga dengan cara terhormat dan dewasa dapat berimplikasi signifikan bagi penegasan jati diri mereka sebagai entitas bersama, Tamanmartani.

Saya sebisa mungkin akrab pada warga, juga mengenalnya secara pribadi. Saya mengajak semua orang untuk peduli pada sesama, bukan hanya anggota keluarga masing-masing. Saya tak sungkan berpikir dan berbincang seputar kualitas pendidikan anak-anak bersama para orang tua, untuk memastikan lahirnya sumber daya manusia baru Tamanmartani yang harus lebih berkualitas dibanding sebelum-sebelumnya.

Bila telah demikian, apalagi dijalankan dengan penuh ketulusan, warga akan lebih terpenggil untuk meningkatkan kualitas partisipasinya, lalu memunculkan kebajikan dan kapabilitas terbaik. Saya menekankan pembangunan rasa saling percaya dan saling menghargai sesama warga Tamanmartani, dalam bingkai besar pembangunan kalurahan yang maju dan mandiri.

Dan yang tak kecil pengaruhnya, kesediaan untuk terus belajar hal baru. Olah intelektual secara berkelanjutan terus dipertahankan dan dimodifikasi sedemikian rupa agar tak membosankan. Saya mendorong sikap saling terbuka di antara warga untuk kemajuan bersama. Apabila warga telah saling percaya dan saling membutuhkan, tentu lebih mudah menggandeng semua pihak untuk fokus pada pembangunan Kalurahan Tamanmartani.

Bagaimanapun, Tamanmartani sungguh membutuhkan kepemimpinan transformasional agar mampu eksis sebagai kalurahan tujuan wisata yang berkebudayaan dan aman serta nyaman.

Kelembagaan Desa, Pemangku Kepentingan Strategis

Desa membutuhkan kemampuan substantif pemerintah desa sebagai penyelenggara *self governing community*. Umumnya, peningkatan kapasitas terhadap perangkat pemerintah desa masih sebatas pelaku administrasi, belum sebagai pelaku demokrasi.

Tapi tidak dengan Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Di Tamanmartani, kelembagaan desa digadang-gadang optimal menyerap aspirasi warga. Kuncinya, turun langsung. Lembaga desa itu maksudnya fasilitas lembaga. Penguatan organisasinya.

Berangkat dari Undang-Undang Desa tahun 2014, kelembagaan desa sungguhlah vital peranannya. Sebab, demokrasi sebenarnya merupakan fondasi penyelenggaraan kewenangan desa. Sejak Undang-Undang Desa

diberlakukan, kepemimpinan desa menjadi terkontrol. Selain itu, semakin terbuka ruang partisipasi warga, serta dilaksanakannya pelebagaan musyawarah desa sebagai ruang deliberasi warga.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Elemen utama demokrasi di desa adalah Pemerintah Desa (Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), masyarakat, dan Musyawarah Desa.

Pemerintah Desa merupakan satu-satunya lembaga penyelenggara pemerintahan desa. Pemdes adalah pemegang seluruh kewenangan di desa. Kepala Desa dipilih secara langsung dengan masa jabatan maksimal tiga kali. Setiap periode selama enam tahun kepemimpinan.

Badan Permusyawaratan Desa didapuk sebagai lembaga perwakilan, yang menjalankan fungsi pemerintahan,

berupa kontrol, representasi, dan legislasi. BPD juga perwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah pengorganisasian, atau wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. LKD bertugas melakukan pemberdayaan, turut merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Sementara Musyawarah Desa menjadi sarana demokrasi deliberatif serta forum pembuatan keputusan strategis desa.

Lebih lanjut, Lembaga Kemasyarakatan Desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 18 tahun 2018, dan nomor 44 tahun 2016, serta Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018.

Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW).

Ada pula Perlindungan Masyarakat (Linmas), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Himpunan Petani Pemakai Air (Hipaa), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam kegiatan

pemberdayaan tertentu, dan masih ada beberapa lagi lainnya.

Selain dua pembagian tersebut, ada yang dinamakan sebagai Petugas Desa, yakni para Penjaga Kantor Desa, Petugas Makam, Penjaga Pasar, Perawat Jenazah (Mudin Kematian), atau yang lainnya. Ada juga Kader Desa, misalnya Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD) dalam bidang Perencanaan, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam bidang kesehatan, Petugas Keluarga Berencana Desa (PKBD), dan lainnya.

Beberapa lembaga lebih populer dibanding lainnya. Lembaga-lembaga tersebut banyak dijumpai eksis di berbagai desa dan kelurahan, berbeda dengan lembaga lain yang masih kesulitan menemukan bentuk terbaiknya. Lembaga-lembaga populer tersebut adalah RT/RW, PKK Desa/Kelurahan, dan Karang Taruna.

RT/RW bertugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yakni menjalankan fungsi pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya. Selain itu, pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar-warga. Selanjutnya, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Terakhir,

penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

PKK Desa/Kelurahan bertugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Tugas PKK yang pertama adalah menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten.

Kedua, menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT, dan dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati. Ketiga, menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Keempat, melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera. Kelima, mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.

Keenam, berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan. Ketujuh, membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan

kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat. Kedelapan, melaksanakan tertib administrasi. Kedelapan, mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

Sementara itu, TP PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya berfungsi sebagai penyuluh dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK, serta fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing Gerakan PKK.

Karang Taruna bertugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial, terutama masalah yang dihadapi generasi muda, baik bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Karang Taruna memiliki fungsi sebagai penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, serta penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah, serta berkesinambungan.

Karang Taruna juga penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di

lingkungannya. Selain itu, menanamkan pengertian, serta memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda. Ditambah dengan penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal yang perlu digarispawahi seputar kewenangan dan tanggung jawab bahwa semua kelembagaan dan personel menjadi kewenangan desa. Konsekuensinya, desa bertanggung jawab atas honor dan anggaran operasionalnya. Semua kelembagaan dan personel bertanggung jawab kepada Kepala Desa, dengan menyampaikan laporan tertulis atas Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) setiap tahun. Periodesasi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lima tahun.

Personel Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih dalam musyawarah secara demokratis atas prakarsa Pemerintah Desa. Para personel secara ideal, arif, dan etisnya tidak merangkap jabatan sesama LKD dan atau Badan Desa. Badan Desa yang dimaksud adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan kerja sama Antar Desa (BKAD), serta Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

Pada praktiknya, orientasi penyelenggaraan pemerintahan desa, misalnya, masih sebatas terpenuhinya syarat dan prosedur. Padahal, banyak orientasi strategis yang dapat diolah dan diwujudkan, seperti mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan warga yang perlu kebijakan afirmasi, menata interaksi warga desa melalui Peraturan Desa (Perdes), dan sebagainya.

Semua kekuatan yang ada di Tamanmartani sudah saya operasionalkan. Tentunya setelah Pemerintah Kalurahan fokus melayani masyarakat. Setiap pertemuan selalu melibatkan masyarakat. Kalurahan mengalokasikan Rp2,5 juta per bulan untuk urusan kependudukan warga. Rata-rata per harinya mencapai 20 permohonan.

Pada konteks Tamanmartani, kepemimpinan kalurahan menjadi kunci perbaikan kinerja pemerintah Kalurahan. Peningkatan kapasitas Pemerintah Kalurahan tidak mungkin optimal tanpa kepemimpinan yang efektif. Pimpinan harus mampu menempatkan personel yang tepat, membagi Tupoksi secara jelas, memberi keteladanan dan disiplin, serta menjalin komunikasi yang intensif.

Untuk itulah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) atau Pemilihan Lurah (Pilur) dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi masyarakat terhadap kinerja Lurah atau Kepala

Desa, juga Pemerintah Desa atau Pemerintah Kalurahan. Pemilihan tersebut diharapkan mampu menghadirkan pemimpin desa yang mampu melakukan perbaikan.

Bagaimanapun, saya memang memiliki kedekatan dengan warga Tamanmartani. Persepsi tersebut dipandang sebagai modal sosial yang utama bagi Pemerintah Kalurahan Tamanmartani. Meski begitu, dalam perkembangannya, tidak sampai menciptakan hubungan ketergantungan. Jadi, maju-tidaknya Tamanmartani bisa sangat bergantung pada baik-buruknya pengelolaan Pemerintah Kalurahan, khususnya kepemimpinan Kalurahan.

Warga Tamanmartani sekarang tertib administrasi. Kapan-kapan siapa pun bisa membuktikannya. Silakan datang ke kantor kalurahan. Anda dapat mencari data warga. Misal, jumlah manula berapa, anak-anak berapa, dan sebagainya.

Orientasi pada output, baik keputusan maupun hasil pembangunan, memang penting. Namun, tentu saja lebih penting, memahami prosesnya. Sumbangsih semua lembaga kalurahan dapat mendorong efektivitas kebijakan pembangunan dengan terus memerhatikan semangat keterbukaan.

Tidak ada keberhasilan, tanpa kerja keras. Kelembagaan Kalurahan Tamanmartani tidak akan eksis, tanpa dinamika. Hingga memasuki periode kedua kepemimpinan, kelembagaan desa masih terus berproses, memperbaiki diri.

Pada periode pertama kemarin, saya memprioritaskan pembangunan fisik dan pembangunan kekuatan lembaga. Tapi ternyata, juga tidak mampu menghadapi gempuran-gempuran politik tingkat desa.

Saya memberi contoh inisiasinya melahirkan Linmas yang boleh dikatakan telah berjalan optimal. Warga khususnya sudah merasakan manfaatnya. Bahkan warga luar yang berkepentingan ke Tamanmartani turut menikmati kontribusi layanan Linmas.

Beberapa waktu berjalan, ketika Ketua Linmas berpindah kepemimpinan, eksistensi organisasinya pun berbeda. Apalagi bila ada yang dengan sengaja dan sistematis memberi pengaruh buruk, untuk tidak loyal pada pelayanan publik. Situasi pun dapat bertambah buruk.

Saya membuat Linmas sudah berjalan. Nanti diganti Ketua Linmasnya, jadi berbeda. Tokoh-tokoh Linmas dipengaruhi hal-hal negatif, misalnya. Hilang semua semangat pelayanannya ke masyarakat.

Padahal, dalam melaksanakan tugas, lembaga kemasyarakatan didesain untuk mampu menjadi penampung dan penyaluran aspirasi warga dalam mendukung pembangunan. Lebih lanjut, lembaga dapat mendorong peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada warga.

Lembaga kemasyarakatan melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. Selain itu, penumbuhkembang dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong warga. Dan tak kalah penting, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan hak politik masyarakat.

Secara umum, lembaga kemasyarakatan membantu Pemerintah Kalurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan warga desa, meliputi rencana pembangunan secara partisipatif dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan.

Mengapa keikutsertaan warga dalam proses pembangunan itu penting? Bahkan sejak analisis masalah, menemukan solusi, memperoleh rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, serta mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin diatasi.

Dengan partisipasi warga, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap warga yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Di sisi lain, warga dapat lebih mengetahui keadaan dan program tersebut serta mempunyai rasa memiliki. Muncullah anggapan bahwa hak demokrasi adalah bila warga dilibatkan dalam proses pembangunan.

Seperti Karang Taruna di Tamanartani. Pada periode pertama kepemimpinan saya, Karang Taruna boleh dibilang, maju. Tapi saat transisi kepemimpinan ke periode kedua, sekitar dua tahun, salah satunya karena pandemi, Karang Taruna *njuk* mati. Sekarang, baru saya *uplek-uplek* lagi.

Dinamika kelembagaan Kalurahan Tamanmartani terbilang positif. Pada masanya masing-masing, setiap kali akan digelar *event*, biasanya diharuskan ada pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dengan kalkulasi yang meyakinkan, Pemerintah Kalurahan lalu mengalokasikan pembiayaan, untuk menyukseskan *event*.

Contoh *event* di sekitaran Tamanmartani yang dapat dijadikan ukuran dinamika kelembagaan kalurahan adalah Mandiri Jogja Marathon, atau lazim disebut Jogmar, sejak 2017. Jogmar mengusung tema *sport tourism*. *Start* lomba bermula di kompleks Candi Prambanan.

Para pelari selanjutnya akan melintasi destinasi wisata utama, seperti Candi Prambanan, Candi Plaosan, dan Monumen Taruna.

Sambil berlari, para peserta dapat berwisata sejarah, menyaksikan warisan luhur dari nenek moyang Nusantara. Pelari menikmati keindahan desa-desa pesona Yogyakarta. Wisata alam dengan suasana kampung dan sawah berikut udara yang masih segar. Latar belakang Gunung Merapi menambah kesan alami yang rasanya, akan sulit dilupakan oleh para peserta *event*.

Wisata budaya pun disuguhkan. Tidak hanya menikmati keindahan alam, para pelari dapat menikmati pertunjukan seni-budaya di sepanjang jalur lomba. Ada pertunjukan gamelan, atraksi budaya jathilan, pukul lesung, dan lainnya digelar di sejumlah titik untuk menghibur para pelari.

Atraksi menarik tersebut semakin menyemangati para peserta lomba. Sebagian pelari penyuka swafoto berhenti sejenak mengambil gambar, berlatar belakang pertunjukan seni-budaya.

Wisata kuliner juga tak kalah menariknya. Makanan Jogja yang enak dengan harganya yang terkenal dapat dijangkau semua kalangan menjadi andalan kalurahan-kalurahan di sepanjang rute lari.

Mandiri Jogja Marathon menjadi momentum penting bagi saya untuk memperkenalkan Tamanmartani, juga melibatkan lembaga-lembaga kalurahan dalam *event*. Saya bertemu dengan panitia, membahas kemungkinan dan peluang pelibatan Karang Taruna, Linmas, Rescue, dan lainnya.

Dengan begitu, lembaga kalurahan pun terlibat aktif, baik yang bersinggungan langsung dengan *event* atau berperan sebagai pendukung. Selain mengkreasi pendapatan, baik pribadi-pribadi maupun lembaga, kolaborasi antar-lembaga kalurahan adalah modal sosial utama untuk bergeser pada program-program lain. Bahwa *event* memang dapat melatih dinamika kelembagaan kalurahan.

Pendapatan yang masuk ke lembaga akan meningkatkan saldo kas. Lembaga dapat mengembangkan aktivitas dan jaringan dengan pembiayaan sendiri. Bahkan untuk mengkreasi pendapatan baru. Jadi, Pemerintah Kalurahan tidak terus-menerus mengeluarkan biaya untuk menggerakkan lembaga kalurahan.

Karang Taruna itu saya godok, salah satunya untuk mengasah ide-ide yang ada, untuk Tamanmartani yang lebih baik.

Prinsipnya, pengorganisasian masyarakat secara sistematis dan terukur untuk mencapai *self-governing community* sangat mungkin dilakukan, asalkan jaminan peran lembaga kalurahan terbuka luas agar mereka bisa dan terbiasa merumuskan kebutuhan dan kepentingannya. Jaminan tersebut membutuhkan kultur kelembagaan yang produktif dan berpikir terbuka, menerima hal baru untuk kemajuan kalurahan.

Selain itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas para pengurus, tidak terbatas pada ketua atau pimpinan terbatas, agar lembaga mampu menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan politik. Penguatan posisi lembaga melalui regulasi sebagai representasi unsur yang mengelaborasi dan mengawal usulan warga dapat diupayakan lebih baik.

Pada akhirnya, lembaga desa sangatlah penting peranannya untuk mengorganisasi pembangunan desa dalam mengidentifikasi segala masalah dan potensi, sekaligus memfasilitasi perumusan prioritas kebutuhan dalam rangka mengatasi masalah dan mengoptimalkan potensi yang ada. Langkah strategis yang membutuhkan kerja keras dan keuletan khusus, bukan hanya asal berangkat dan asal berbuat.

Bukan hanya bertumpu pada Pemerintah Desa, lembaga desa dapat memulai pengabdianya, mulai dari

hulu, yaitu level subdesa, baik unsur maupun wilayah. Tamanmartani punya pedukuhan yang sarat potensi dan dapat dikembangkan lebih optimal. Berbasis pendataan yang valid, pengambilan kebijakan di tingkat desa akan sangat berpengaruh pada baik-buruknya pemerintah daerah di atasnya, hingga ke level nasional.

Desa sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan warga kemudian mampu berkontribusi besar pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Betapa penting membenahi lembaga-lembaga desa itu, karena eksistensi dan kehadiran negara sungguh terwakili oleh Pemerintahan Desa. Persepsi atas kinerja negara, ditentukan oleh pelayanan pemerintah desa yang benar-benar mengerti kebutuhan dan kepentingan warganya. Bukan bertumpu pada kebijakan dari Pusat lalu diterapkan secara buru-buru di desa.

Begitulah. Sekali lagi, Tamanmartani memberi semangat positif bagi setiap pejuang desa, untuk bertahan, berkreasi, melompat, dan sejahtera, dari sumber daya lokal yang dikelola dengan sungguh-sungguh. Tak kurang dan tak lebih, Anda pun mampu melakukannya, selama koridor aksinya untuk kemaslahatan bersama yang lantas bermanfaat untuk semuanya, termasuk pribadi-pribadi di dalamnya. Bukan sebaliknya.

Dengan komitmen kebersamaan, pengaturan kepentingan berdasarkan permufakatan, dan visi keberdikarian yang kolaboratif, desa kini menjadi tumpuan banyak kalangan, setelah selama ini desa yang mampu menyediakan air bersih, udara segar, dan makanan sehat, pun warga yang ramah.

Peran Aktif Karang Taruna

“Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.”

Sebuah pesan dari Sang Proklamator, Bung Karno, yang memiliki makna mendalam, tentang seberapa besar pengaruh dan manfaat pemuda.

Dalam kehidupan bermasyarakat, peran para pemuda sangatlah vital. Berbagai organisasi pemuda, seperti Karang Taruna diharapkan dapat menjadi cikal bakal dalam pembentukan suatu wilayah yang maju dengan berbagai inovasinya.

Karang Taruna sebagai lembaga kemasyarakatan baik di tingkat Kabupaten, Kapanewon, maupun Kalurahan tidak hanya sebagai kumpulan remaja yang mempunyai misi dan tujuan, namun peran mereka juga dapat membantu warga masyarakat sekitar.

Karang Taruna di Kalurahan Tamanmartani selalu aktif dalam berbagai kegiatan, terutama dalam kegiatan sosial masyarakat dan pembangunan desa. Jumlah anggota Karang Taruna kurang lebih 20 orang anggota aktif.

Hampir seluruh kegiatan yang ada di Tamanmartani melibatkan Karang Taruna, di antaranya pertemuan rutin, kepanitiaan hari besar, berpartisipasi dalam kegiatan sosial desa, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.

Keanggotaan Karang Taruna diikuti oleh generasi muda, mulai dari umur 13 tahun hingga 30 tahun. Adapun beberapa anggota yang lebih tua berperan sebagai Pembina. Sistem kerja dan tanggung jawab Karang Taruna berpedoman pada jabatan masing-masing.

Sebagai organisasi kepemudaan di desa sudah sepatutnya Karang Taruna membaur di tengah-tengah masyarakatnya dalam kegiatan yang berbau sosial atau gotong royong. Sebelum ada pandemi Covid-19, mereka selalu berperan aktif dalam kesibukan warga, dari mulai sibuk hajatan pernikahan maupun hajatan khitanan.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar semua pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna menjadi

kompak dan bersatu dalam rangka membantu dan memajukan kampungnya masing-masing.

Hal ini dilakukan agar pemuda menjadi aktif dalam kegiatan masyarakat, dapat berperan positif dalam segala kegiatan, juga bisa mengurangi hal-hal negatif yang bisa jadi timbul di kalangan anak-anak muda.

Sementara dalam penanganan Covid-19 di Tamanmartani, para anggota Karang Taruna Tamanmartani terus berperan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk patuh protokol kesehatan. Sosialisasi terutama disiplin menggunakan masker untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Karang Taruna yang mampu menggerakkan generasi muda. Maka Karang Taruna bisa memanfaatkan momentum pandemi untuk mengkampanyekan tata cara kehidupan baru dengan selalu menerapkan gaya hidup sehat sesuai protokol kesehatan yang ada. Di masa pandemi, peran Karang Taruna sangat dibutuhkan dalam mengkampanyekan upaya-upaya penanganan Covid-19.

Pada awal kasus Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, saya mengajak para pemuda Karang Taruna berinisiatif membuat gerbang disinfektan dan dibagikan untuk tiap dusun di Tamanmartani, sejumlah

20 buah. Masyarakat menjadi mempunyai rasa untuk mengamankan wilayahnya.

Partisipasi dari masyarakat inilah yang dibutuhkan dalam pembangunan di suatu wilayah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu amanat agenda reformasi dalam kerangka demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.⁹

Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia sebagai bangsa telah berhasil melaksanakan pembangunan, namun keprihatinan juga muncul apabila kita mengamati proses pelaksanaan pembangunan di negara kita di mana proses pelaksanaan pembangunan Indonesia dalam kenyataannya belum sepenuhnya diikuti oleh suatu usaha

9. Isbandi Rukminto Adi. 2013. *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

yang serius untuk membentuk suatu keadaan di mana negara menghargai hak-hak dasar dari rakyatnya.

Secara umum, pembangunan dalam suatu bangsa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada bangsa itu sendiri. Hal ini pun termasuk bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan masyarakatnya. Pembangunan tanpa disertai langkah-langkah pemberdayaan pada masyarakat untuk bisa berperan aktif, inovatif, dan mandiri sangatlah naif untuk bisa memberi jawaban atas pertanyaan, sejauh mana pembangunan yang telah dicapai Bangsa Indonesia demi kemakmuran dan kesejahteraan yang dicita-citakan bagi rakyatnya.

Upaya pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dalam pembangunan merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena titik sentral pembangunan pada dasarnya terletak pada rakyat.

Pemerintah meyakini bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan salah satu prasyarat utama untuk memahami pentingnya partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan langkah maju. Walaupun ada kemauan pemerintah, namun pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup banyak mengalami hambatan.

Keterlibatan unsur masyarakat secara lebih besar di sini maksudnya bukan hanya keterlibatan fisik, tetapi keterlibatan kepentingan seluruh masyarakat. Dalam upaya meningkatkan keberdayaan, negara dalam hal ini pemerintah, tidak lagi sangat dominan dalam kegiatan pembangunan dan juga bukan sebagai aktor tunggal, serta juga bukan orientasi utama kegiatan pembangunan, artinya kegiatan pembangunan tidak lagi diprioritaskan dalam upaya meningkatkan kejayaan pemerintah (negara).

Prioritas utama kegiatan pembangunan sekarang diarahkan pada rakyat, bagaimana meningkatkan keberdayaan rakyat dalam berbagai bidang kehidupan. Pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 1 ayat 12, “Upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.”

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu metode gerakan yang digunakan dalam menjalankan pembangunan masyarakat baik dalam aspek ekonomi,

sosial budaya, pendidikan, kesehatan, atau kombinasi semua aspek tersebut.

Kehadiran Karang Taruna di Kalurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda di bidang kesejahteraan sosial hendaknya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya generasi muda.

Berbagai cara dan upaya perlu dilakukan sehingga Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan di Kalurahan semakin mantap kedudukannya untuk ikut serta aktif dalam mempersiapkan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang berkualitas tinggi.

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Karena, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal itu dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing. Peran tersebut dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selain itu, Karang Taruna merupakan salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan diri ke arah hal positif, dalam hal ini kesejahteraan sosial terutama di bidang pembangunan lingkungan dan negara pada umumnya.

Selain menampung aspirasi, Karang Taruna berperan sebagai wadah penanaman rasa kebangsaan secara nasional, serta pengembangan potensi diri.

Bentuk-bentuk kegiatan maupun pendekatan yang dilaksanakan dalam proses penanganan berbagai masalah sosial yang menjadi perhatian Karang Taruna pun semakin kreatif, tidak hanya kegiatan sosial yang dilakukan oleh Karang Taruna melainkan ada juga keagamaan dan kesenian. Penanganan yang dilakukan oleh Karang Taruna mulai dari penanganan secara sederhana hingga penanganan yang terencana dan terorganisasi dengan baik.

Pemberdayaan Linmas

Dalam upaya mewujudkan keamanan lingkungan, Kalurahan Tamanmartani mengajak seluruh warga masyarakat untuk menggalakkan pengamanan lingkungan melalui swadaya masyarakat.

Selain itu, Kalurahan Tamanmartani juga melibatkan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat Tamanmartani, bahkan selalu mengikutsertakan Satlinmas dalam berbagai acara.

Keberadaan Linmas memiliki peran strategis yang tidak hanya berorientasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas, tetapi juga garda terdepan dalam memberikan bantuan keselamatan jika terjadi bencana di masyarakat.

Pada era modern ini, sebagian besar orang mungkin sudah melupakan Satlinmas. Para aparat keamanan lebih terfokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan dan peralatan pengamanan. Mereka lupa, ada Satlinmas yang sebenarnya memiliki fungsi vital dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Satlinmas sebenarnya memegang peranan mendasar. Satlinmas menjadi pendeteksi awal atas potensi-potensi konflik dan ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Ini dikarenakan akses mereka yang membaur dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Satlinmas merupakan jajaran keamanan pertama yang turun langsung ke masyarakat, misalnya terjadi perselisihan warga. Satlinmas biasanya akan membantu menyelesaikannya bersama Kalurahan setempat. Kenakalan remaja, tindakan pencurian, maupun penanganan pertama terhadap bencana tak akan luput dari perhatian Satlinmas.

Saat ini, diperlukan regenerasi untuk melanjutkan dan meningkatkan struktur Satlinmas. Hal ini semata-mata untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas

Satlinmas serta memberikan kesempatan bagi kalangan muda agar berpartisipasi dalam menjaga lingkungan masyarakatnya.

Satlinmas merupakan aset sebagai relawan dalam berbagai dinamika di masyarakat. Saat ini diperlukan regenerasi untuk melanjutkan kerja dan memperbarui struktur organisasinya. Kondisi Satlinmas masih didominasi oleh generasi tua. Diperlukan kalangan muda yang juga dilibatkan.

Kalurahan pun terus mengawasi serta melibatkan Satlinmas dalam berbagai kegiatan di Tamanmartani. Saya mengimbau Satlinmas untuk aktif dalam peran sertanya menangani kejahatan jalanan yang marak terjadi, terutama di lingkungan remaja dan pelajar.

Satlinmas merupakan sekelompok orang yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan guna dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanganan bencana, menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban, serta dapat berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Tentang terbentuknya Satlinmas itu sendiri, mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang sampai sekarang ini. Sebelum terbentuknya Satlinmas, dahulu sering juga disebut dengan Pertahanan Sipil (Hansip).

Awal dibentuknya organisasi Hansip dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda untuk menghadapi serangan dari Jepang. Pemerintah Belanda membentuk suatu organisasi yang bertugas untuk melindungi masyarakat dari serangan udara musuh. Waktu itu dikenal dengan LBD (*Luch Bescherming Dienst*) atau Perlindungan Pemecah Udara.

LBD dibentuk dari tingkat pusat sampai daerah yang dikoordinasikan oleh pejabat-pejabat pemerintahan sipil. Kegiatannya meliputi penerangan masyarakat, pemberitaan serangan udara musuh, perlindungan, penyamaran, pemadam kebakaran, pertolongan pertama pada penderita kecelakaan, pengungsian, dan lain-lain.

Setelah zaman pendudukan Jepang, Pemerintah Jepang membentuk organisasi semacam LBD yang disebut Pertahanan Sipil pada 1943 yang waktu itu diarahkan kepada pertahanan dan untuk pengerahan rakyat total. Organisasi tersebut dibentuk sampai di lingkungan masyarakat terkecil dalam bentuk *gumi* atau yang sekarang dikenal sebagai RT.

Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Hansip yang dirangkaikan dengan kepentingan pertahanan dan perlindungan masyarakat terhadap serangan musuh.

Selain itu, Hansip dibebani dalam hal penjagaan keamanan, pengumpulan dana, pengaturan bahan makanan, dan lain-lain. Selanjutnya setelah zaman kemerdekaan, lahirlah Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan No MI/A/72/62 tanggal 19 April Tahun 1962 Tentang Peraturan Pertahanan Sipil, sampai dengan 1972.

Ketika pembinaan Hansip diserahkan dari Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata kepada Menteri Dalam Negeri dikukuhkan dengan 1 Keppres No 55 Tahun 1972. Bersamaan dengan Keppres No 55 Tahun 1972, telah ada pula Keppres Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Keamanan Rakyat (Kamra) dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem pertahanan keamanan rakyat.

Ketika Hansip diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri pada intinya masih berkisar pada pertahanan, dan keamanan, Hansip ditugaskan untuk memobilisasi rakyat untuk kegiatan pertahanan negara, mobilisasi aktivitas masyarakat sipil dalam pertahanan negara melawan musuh.

Namun, dalam perkembangannya, setelah masuk dalam pembinaan Departemen Dalam Negeri, satuan

pertahanan sipil dalam kehidupannya membantu sosial kemasyarakatan dalam bentuk pengamanan lingkungan.

Tugas-tugas Hansip dalam sosial kemasyarakatan adalah membina ketertiban masyarakat sosial masyarakat, membantu masyarakat ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, seperti kematian, hajatan, upacara, dan keagamaan. Sampai pembentukan dapur umum di desa atau kelurahan ketika ada bencana. Hansip tidak pernah menjalani latihan dasar militer (latsarmil) dan belum mendapat arahan yang tepat dari Departemen Dalam Negeri selaku pembina Hansip.

Baru pada 2002, Hansip kemudian berubah nama menjadi Linmas hingga saat ini. Meski begitu, perubahan itu hanya pada label namanya. Landasan hukum tentang tugas pokok, fungsi, dan perannya masih tetap sama. Sebagai gambaran tugas pokok Hansip ketika dinaungi Departemen Pertahanan Keamanan meliputi pertahanan keamanan sedangkan dalam Linmas dimaknai sebagai suatu fungsi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Fungsi memberikan perlindungan masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Linmas. Dengan demikian, pembinaan terhadap Linmas

sejak 2004 dilaksanakan oleh pemerintah daerah di bawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan urusan wajib menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat.

Sejalan dengan beriringnya waktu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Wanra dan Kamra dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem pertahanan keamanan rakyat dirasakan sudah tidak sesuai, sementara Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah lebih menekankan pada perlindungan dan ketertiban masyarakat.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mencabut Keputusan Presiden tersebut melalui melalui Peraturan Presiden No 88 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Keamanan Rakyat (Kamra) dalam rangka

penertiban pelaksanaan sistem pertahanan keamanan rakyat supaya Linmas bisa dikembangkan lebih lanjut.

Kemudian sampailah kepada diterbitkannya Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2014 tentang pencabutan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertanahan Sipil dan Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Keamanan Rakyat (Kamra) dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem pertahanan keamanan rakyat.

Mulai saat itu terdapat kekosongan peraturan tentang perlindungan masyarakat maupun pertahanan sipil. Dengan dicabutnya Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1972, merupakan momentum yang tepat untuk segera menata ulang satuan perlindungan masyarakat agar keberadaannya lebih berkembang dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagaimana diketahui masih banyak peraturan yang mendefinisikan Satuan Perlindungan Masyarakat seperti di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satlinmas dalam penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum.

Kata ‘keamanan’ tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 disebut bahwa Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan

untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pada definisi Satlinmas itu sendiri terdapat kandungan arti tugas-tugas, penjabaran dari urusan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh anggota Satlinmas.

Pemerintah daerah tidak boleh mengambil yang menjadi urusan pemerintah seperti dalam bidang keamanan, karena urusan bidang keamanan merupakan menjadi kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tupoksi yang dilaksanakan dengan kepolisian tersebut jelas menggambarkan bahwa banyak tugas tersebut terdapat kemiripan dengan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat, hanya saja penekanannya terdapat pada urusan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, serta urusan pemerintah daerah hanya pada pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasarnya kepada masyarakat, didasari dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintah Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Di dalam pesan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 mengamanahkan bahwa yang terkait dengan tupoksi dari satuan perlindungan masyarakat di daerah, menurut jenis pelayanan dasarnya adalah pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, dengan indikator cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota dengan nilai satu orang atau anggota satuan perlindungan masyarakat pada setiap rukun tetangga atau sebutan lainnya, target capaian pada Tahun 2014.

Dengan adanya garis komando Satlinmas sampai kepada tingkat RT dan RW, dapat dipastikan maka jumlah anggota Satlinmas akan lebih besar dari TNI dan POLRI serta BPBD. Jumlah yang besar itu merupakan kekuatan dan peluang, bila anggota tersebut diberi pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melaksanakan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Anggota Satlinmas tentunya dapat diberdayakan dan didayagunakan untuk mengisi kekosongan yang tidak dapat dijangkau oleh TNI, POLRI, dan BPBD serta Satpol PP secara cepat, tepat dan langsung melayani masyarakat. Untuk dapat langsung melayani masyarakat secara cepat dan tepat, diperlukan tenaga yang terampil dan memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai anggota Satlinmas di Kalurahan dan Desa belum memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang persiapan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menangani kebencanaan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta aktif berperan di masyarakat. Dengan minimnya pengetahuan dan keterampilan tentang kelinmasan maka anggota Satlinmas menjadi ragu untuk melakukan tugas dan fungsinya.

Tapi tidak dengan Tamanmartani. Satlinmas Tamanmartani dapat diandalkan para warga maupun bukan warga untuk menjalankan tugasnya.



Bagian 2

Pelayanan Berbasis Kepedulian





Pelayanan Prima

Pada awal tahun 2021, Kelurahan Tamanmartani menginisiasi program pelayanan administrasi ‘Prima’ dengan jemput bola. Program baru ini berupa layanan gratis yang mempermudah pengurusan surat-surat kependudukan, seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, mutasi kependudukan, penggantian KTP hilang atau rusak, dan surat-surat kependudukan lainnya.

Pelayanan Prima tanpa dipungut biaya, sampai selesai kepengurusannya. Dengan layanan Prima diharapkan warga Tamanmartani dapat lebih tertib administrasi. Melalui program pelayanan tersebut dapat memberikan kepuasan sekaligus kepercayaan kepada masyarakat, karena menunjukkan adanya perhatian dari Pemerintah Kelurahan, dan warga tidak perlu datang ke Kantor Kelurahan. Bebas biaya, bebas repot.

Prosedurnya, warga atau pemohon datang ke rumah Kepala Dukuh atau Ketua RT dan RW, untuk meminta surat pengantar. Setelah syarat lengkap, warga menghubungi Kalurahan untuk mengambil berkas di rumah warga. Selanjutnya, petugas Kalurahan akan datang ke rumah warga dan langsung memprosesnya ke dinas atau instansi terkait. Setelah jadi, petugas mengantarkan surat-surat tersebut sampai rumah warga atau pemohon.

Dalam sehari, rata-rata ada sekitar 20 permohonan. Dengan adanya layanan tersebut warga bisa merasakan kemudahan untuk mengurus administrasi.

Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Logika ini dapat dipahami dengan melihat rumusan norma dalam UU Desa yang secara umum memberikan otonomi secara luas kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (*self-governing community*).

Dengan demikian, warga Desa akan semakin dekat dengan penyelenggara layanan, yaitu Pemerintah Desa (Pemdes). Mengikuti logika tersebut maka pelayanan publik yang selama ini lebih banyak diselenggarakan

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, semestinya dapat juga dilakukan oleh Pemdes.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa secara konseptual telah memberikan acuan dalam pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota (pemerintah supra desa) kepada desa.

Mengacu pada peraturan ini dapat dikatakan bahwa Pemdes dapat menjalankan pelayanan publik yang semula menjadi kewenangan pemerintah supra desa, sepanjang ada penugasan untuk menjalankannya.

Di sisi lain, sebenarnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa telah memerinci jenis-jenis kewenangan asli Desa secara spesifik sebagaimana tercantum pada pasal 2 hingga pasal 14.

Berbeda dengan Permendagri, Permendes itu hanya menyebutkan kewenangan asli Desa tanpa mengatur hal-hal yang terkait dengan pelimpahan kewenangan oleh pemerintah supra desa. Permendes juga tidak mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai

konsideran, sehingga tidak tampak dimensi pembagian urusan di dalamnya.

Hal yang terkait langsung dengan pelayanan publik, Permendesa mencantumkannya dalam pasal 9 huruf (a) di mana dinyatakan bahwa kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa antara lain meliputi pelayanan dasar desa.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan dasar Desa dijabarkan pada pasal 10, antara lain meliputi pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengembangan tenaga kesehatan Desa, pengelolaan dan pembinaan Posyandu, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional, pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa, serta fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Karena, menurut Permendes, kewenangan ini adalah kewenangan asli Desa maka Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan pelayanan publik dalam bidang-bidang tersebut, tanpa harus menunggu pelimpahan wewenang dari pemerintah supra desa.

Kedua peraturan menteri itu dapat menjadi acuan yang jelas tentang praktik pelayanan publik di Desa, sekaligus menjawab pertanyaan kritis tentang relasi pelayanan publik di Desa dengan pembagian urusan pemerintahan supra desa.

Permendesa menjadi acuan bagi Desa untuk menjalankan pelayanan publik yang melekat pada kewenangan asli Desa, sedangkan Permendagri memperjelas mekanisme pelimpahan kewenangan supra desa sehingga ada kejelasan bagi Desa untuk menjalankan pelayanan publik yang melekat pada kewenangan supra desa.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ada peluang terjadinya kebingungan Desa dalam mengimplementasikan kedua peraturan tersebut, karena adanya pengaturan yang terkesan tumpang tindih.

Kementerian Dalam Negeri RI telah menerbitkan Permendagri 2 tahun 2017 tentang standar Pelayanan Desa Minimal (SPM). Permendagri tersebut mengatur urusan pemerintahan desa dalam melayani kepentingan masyarakat desa. Sebagaimana wajah desa adalah wajah negara, dengan adanya Permendagri ini pelayanan desa akhirnya memiliki SPM yang bisa mempermudah masyarakat dalam berdesa.

SPM desa dalam Permendagri 2 tahun 2017 memiliki maksud untuk mendekatkan, mempermudah, transparansi, dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. SPM Desa bertujuan untuk mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, dan menjadi alat kontrol masyarakat kepada Pemerintah Desa.

SPM Desa ditetapkan dan diputuskan oleh Kepala Desa. Ruang lingkup SPM Desa meliputi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat.

Adanya SPM Desa dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan pelayanan kepada masyarakat, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3 dalam Permendagri ini menyebutkan SPM desa bertujuan untuk mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya, dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.

SPM Desa antara lain meliputi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat.

Sementara menurut peraturan Bupati Sleman nomor 29 Tahun 2020 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kalurahan menjelaskan bahwa Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Pedukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.

Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sementara Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Lurah yang terdiri dari sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah DIY.

Lurah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi pelaksanaan tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, pelaksanaan administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

Lurah dalam melaksanakan tugas pembangunan mempunyai fungsi pembangunan prasarana dan sarana Kalurahan, pembangunan bidang pendidikan,

dan pembangunan bidang kesehatan. Lurah dalam melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan mempunyai fungsi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pembinaan partisipasi masyarakat, pembinaan sosial budaya masyarakat, pembinaan keagamaan, dan pembinaan ketenagakerjaan.

Peran serta masyarakat dalam SPM Desa diatur dalam Pasal 23 Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Masyarakat dapat terlibat dalam penyelenggaraan SPM Desa, yaitu memberikan informasi data yang diperlukan oleh penyelenggara SPM Desa dan memberikan masukan dalam proses SPM Desa.

Sebagai subjek pembangunan, tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin.

Ide-ide pembangunan harus yang didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimanfaatkan bersama dalam musyawarah

pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat melalui BPD.

Berkaitan dengan penyelenggaraan dalam pemerintahan di desa, pemerintah desa sebagai penggerak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus didasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin.

Kalurahan Tamanmartani berharap melalui program pelayanan Prima tersebut dapat memberikan kepuasan sekaligus kepercayaan kepada masyarakat, karena menunjukkan adanya perhatian dari Pemerintah Kalurahan, dan warga tidak perlu datang ke Kantor Kalurahan.

Membangun Ratusan Sumur Resapan

Air merupakan sumberdaya yang mutlak diperlukan dan mempunyai manfaat besar bagi kehidupan makhluk hidup, tidak hanya manusia melainkan juga bagi tumbuhan dan hewan.

Manusia menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari kebutuhan domestik, seperti: minum, mandi, masak dan cuci, hingga pertanian, peternakan, serta industri. Sumber air yang dimanfaatkan berasal dari air permukaan dan air tanah.

Air permukaan merupakan air yang terdapat dalam sungai, waduk, rawa, dan badan tubuh air yang tidak mengalami infiltrasi masuk ke dalam tanah. Sedangkan air tanah merupakan air yang terdapat di wilayah zona jenuh, di mana letaknya di bawah permukaan tanah tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Karena air merupakan sumber daya alam yang paling utama untuk manusia, kelestarian air pun perlu dijaga agar kuantitas dan kualitasnya tetap terjaga dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu upaya dalam menjaga kelestarian air adalah dengan cara melakukan konservasi air.

Kebutuhan air di Indonesia yang sebagian besar dipasok dari air tanah, harus diimbangi dengan ketersediaan air tanah di mana ketersediaan air tanah tergantung dengan ketersediaan daerah untuk meresapkan air ke dalam tanah.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat 3 dijelaskan bahwa sumber daya air merupakan bagian dari kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Negara Indonesia sendiri mempunyai ketersediaan air yang melimpah dibandingkan negara-negara yang berada di Benua Afrika, meski masih banyak rakyat Indonesia yang kekurangan air dan harus berjalan berkilo-kilo meter untuk mendapatkan air.

Meskipun pengelolaan sumber daya air sudah diatur dalam konstitusi negara, akan tetapi tingkat kesadaran Indonesia dalam menghargai sumber daya air masih kurang. Untuk itu, penting bagi masyarakat

untuk mengetahui konservasi sumber daya air agar ketersediaan air yang ada dapat digunakan dengan optimal dan terjaga kelestariannya.

Berangkat dari kepedulian terhadap lingkungan, Pemerintah Kalurahan Tamanmartani berinisiatif membuat ratusan sumur resapan. Pembuatan sumur resapan didasarkan pada fakta tentang mayoritas warga Tamanmartani yang menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air, setiap harinya.

Kalau kita tidak mengembalikan air itu kembali ke tanah, air tanah itu kuantitasnya akan turun. Jika air tanah habis, dan warga masyarakat Tamanmartani harus beli air, apa tidak membuat mereka semakin terpuruk?

Pengelolaan air tanah dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air permukaan. Jika penggunaan air tanah tidak diatur, air permukaan akan turun ke dalam. Kondisi tersebut membuat pengguna air permukaan seperti rumah tangga akan kesulitan mengakses air.

Sumur resapan merupakan teknologi sederhana yang dapat dibuat oleh masyarakat secara mandiri untuk mengonservasi air hujan. Apalagi air hujan merupakan salah satu sumber air bersih yang bagus dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

Sangat disayangkan melihat air hujan yang melimpah namun tidak dimanfaatkan dan hanya mengalir ke drainase.

Selain itu, sumur resapan bisa mencegah terjadinya bencana banjir serta memperbaiki struktur tanah. Sumur resapan bisa menjadi sarana memperbaiki kualitas sumber air bersih di dalam tanah.

Untuk diketahui, sumur resapan adalah salah satu konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai sumur galian dengan kedalaman tertentu. Sumur resapan kebalikan dari sumur air minum.

Sumur resapan merupakan metode buatan untuk meningkatkan sumber air tanah. Sumur resapan mampu mengumpulkan, menangkap, dan meresapkan air hujan ke dalam tanah.

Hal yang tidak kalah penting lagi, khususnya di kota besar, manfaat sumur resapan adalah mencegah penurunan tanah dan mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah.

Nantinya, air tersebut akan meresap ke tanah yang dapat menyimpan air. Air yang terkumpul di lapisan akuifer dapat digunakan selama musim kemarau untuk mengisi sumur dangkal atau meningkatkan aliran mata

air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di hilir sungai.

Berbeda dengan sumur air minum yang berfungsi untuk menaikkan air tanah ke permukaan, sumur resapan merupakan lubang untuk memasukkan air ke dalam tanah.

Manfaat utama dari sumur resapan adalah untuk mempertahankan aliran permukaan sehingga dapat mencegah banjir sekaligus mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah. Sumur resapan juga dapat mengurangi erosi dan menahan intrusi air laut untuk daerah yang berdekatan dengan kawasan pantai.

Dalam pengerjaannya, pembuatan bangunan konservasi air sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat sekitar sehingga selain masyarakat mendapatkan manfaat ekologi dari adanya sumur resapan, juga mendapatkan manfaat ekonomi.

Dengan adanya pembangunan sumur resapan, air hujan menjadi bermanfaat karena dapat diresapkan ke dalam tanah dan air yang meresap dapat digunakan kembali di musim kemarau. Halaman rumah menjadi tidak becek, karena aliran air hujan tidak menggenang dan langsung masuk ke dalam sumur resapan.

Selain memiliki fungsi pengendalian air di musim hujan, sumur ini juga berguna untuk memperbaiki debit air tanah. Pembangunan sumur resapan dapat menjadi salah satu solusi efektif di musim kemarau. Sumur resapan bisa mencegah kekeringan dan krisis air bersih saat musim kemarau.

Sumur resapan termasuk salah satu bangunan drainase yang tidak hanya mampu menurunkan genangan pada saat hujan, tetapi juga mampu menambah cadangan air tanah yang dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau.

Dengan demikian pembangunan sumur resapan berdampak pada berkurangnya ancaman kekeringan dan krisis air bersih. Pemerintah perlu menekankan pembangunan sumur resapan di daerah-daerah rawan kekeringan.

Sumur resapan dapat dibuat dengan teknologi yang sangat sederhana. Konstruksinya sangat mudah dibuat. Cukup dengan membuat sumur sedalam kurang lebih tiga meter, dengan dinding sumur dari bis beton. Harganya juga terjangkau.

Idealnya, setiap rumah memiliki minimal satu sumur resapan. Ukurannya tergantung pada besar kecilnya rumah. Sumur resapan tersebut nantinya akan menyimpan air hujan ke dalam tanah.

Terlebih, Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang mempunyai pertambahan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk yang meningkat di Kabupaten Sleman setiap tahunnya mempengaruhi kebutuhan penduduk akan sumberdaya air yang meningkat pula. Apabila ketersediaan air tidak mencukupi penduduk di Kabupaten Sleman maka akan terjadi permasalahan ketersediaan sumberdaya air.

Jumlah penduduk yang meningkat di Kabupaten Sleman mendorong pembangunan, seperti pembangunan permukiman dan perumahan. Pembangunan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sleman yang berakibat pada peningkatan limpasan permukaan, sehingga apabila air yang masuk ke dalam tanah jumlahnya sedikit maka dapat menyebabkan jumlah air tanah berkurang dan terjadi bencana banjir.

Selain pembangunan, aktivitas penduduk di Kabupaten Sleman sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah air tanah. Beberapa aktivitas penduduk di Kabupaten Sleman, seperti memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya membutuhkan air tanah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Penggunaan air tanah secara terus menerus tanpa memperhatikan kondisi lingkungan di Kabupaten Sleman

mengakibatkan terjadi penurunan muka air tanah yang berdampak pada berkurangnya jumlah air tanah yang tersimpan di dalam akuifer.

Kondisi ini diperburuk oleh adanya kegiatan seperti industri dan hotel yang memanfaatkan air tanah dalam skala cukup besar. Jumlah hotel di Kabupaten Sleman cukup banyak dan jumlah industri di Kabupaten Sleman setiap tahun bertambah.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah bentuk lahan asal proses vulkanik, dicirikan dengan adanya Gunungapi Merapi yang masih aktif, di mana keberadaan gunungapi menjadikan tanah subur dan keberadaan gunung api sangat berperan dalam siklus hidrologi, terutama dalam menjaga keseimbangan sumberdaya air.

Beberapa tahun yang lalu, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mewajibkan setiap perumahan yang berada di wilayah Sleman untuk menyediakan ruang resapan air guna optimalisasi penghijauan ruang publik.

Bagi perumahan, aturan ini sifatnya wajib, sedangkan bagi masyarakat yang telah membangun rumah sangat diharapkan untuk turut berpartisipasi menyediakan ruang resapan air.

Setiap kavling harus menyediakan ruang resapan air 30 persen luas lahan di luar kawasan resapan air

dan 40 persen luas lahan di kawasan resapan air yang digunakan untuk ruang terbuka.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menentukan luasan kavling di wilayah perkotaan di luar daerah resapan air yang dipersyaratkan minimal 125 meter persegi dan yang di kawasan resapan air 200 meter persegi dan untuk kawasan pedesaan yang di kawasan resapan air batas minimal kavling 500 meter persegi dan di luar kawasan resapan air luas kavling minimal 200 meter persegi.

Seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk memanfaatkan dan meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dengan menghijaukan lingkungan di sekitar dengan menanam lahan yang ada dengan berbagai jenis tanaman, serta menjaga dan mempertahankan daerah resapan air.

langkah yang terlihat sederhana pun bisa memberi pengaruh signifikan bagi ketersediaan air jika dilakukan bersama-sama. Misalnya, menggiatkan penanaman pohon di pinggir sungai, halaman rumah, atau lokasi lainnya.

Kabupaten Sleman memiliki fungsi sebagai daerah penyangga air bagi Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya untuk menjaganya harus dilakukan

bersama-sama dengan masyarakat dan tampaknya masyarakat Sleman semakin meningkat kepeduliannya yang dibuktikan dengan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang mampu mengelola sampah dan limbah secara mandiri.

Bagian 3

Kalurahan Mandiri





Asosiasi Profesi dan Ngabei Mart, Pilar Utama Perekonomian Tamanmartani

Kalurah Tamanmartani menginisiasi berbagai asosiasi profesi tingkat kalurahan. Terasa janggal, sepiantas lalu. Karena biasanya, asosiasi profesi banyak dilegalkan minimal di tingkat kabupaten atau kota. Dan ternyata, pengaruhnya signifikan bagi perekonomian Tamanmartani.

Contoh organisasi profesi di Indonesia yang populer, di antaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Asosiasi Guru Sains Indonesia (AGSI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dan masih banyak lainnya.

Perekonomian Tamanmartani saya perkuat dengan merawat kelompok-kelompok profesi. Mungkin di Kabupaten Sleman, terutama, hanya ada di Tamanmartani. Ada asosiasi pedagang kelontong, asosiasi pedagang ayam goreng, asosiasi *laundry*, dan lainnya.

Asosiasi profesi atau organisasi profesi jamak dipahami sebagai sebuah organisasi non-profit, beranggotakan orang-orang dengan latar belakang profesi sama yang umumnya memiliki tujuan memajukan dan mempromosikan profesi tersebut. Selain itu, meningkatkan kompetensi anggota, juga melayani serta melindungi kepentingan publik dan anggotanya.

Anggota dari organisasi profesi yakni para praktisi yang bergabung untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka lakukan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Dalam organisasi profesi, para anggota profesi hidup dalam kebersamaan dan kesejawatan, bersatu padu melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan profesi yang digelutinya.

Asosiasi profesi diorientasikan untuk mengembangkan dan memajukan profesi, menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi, menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi, memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi.

Magali Sarfatti Larson, seorang Guru Besar Sosiologi di Universitas Temple Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, mendefinisikan profesi sebagai sebuah atau sekelompok pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus.¹⁰

Secara umum, karakter profesi memiliki asosiasi profesi, membutuhkan keterampilan yang berdasarkan pengetahuan (*cognitive base*), terdapat pelatihan atau pendidikan secara institusi yang memberikan pengetahuan dan pengalaman praktis seputar kompetensi yang dipersyaratkan.

Selanjutnya, terdapat lisensi atau sertifikasi sebagai bukti kompetensi, memiliki otonomi dalam pekerjaan, memiliki kode etik, serta ada standar honor atau gaji yang ditetapkan dan diatur oleh asosiasi profesi.

Asosiasi profesi turut serta mengembangkan ilmu dan teknologi profesi, meningkatkan mutu pelayanan kepada sasaran layanan, dan menjaga kode etik profesi.¹¹

Dibuatnya organisasi profesi dimaksudkan dapat memberikan dukungan dan kontribusi positif bagi para anggotanya, untuk senantiasa mengembangkan ilmu

10. Larson, Magali Sarfatti. 1978. *The Rise of Professionalism: a Sociological Analysis*. Berkeley, California: University of California Press. h. 208.

11. Ikatan Konselor Indonesia. 2008. *Arah Pemikiran Pengembangan Profesi Konselor*. Padang: IKI.

pengetahuan dan teknologi serta melahirkan berbagai inovasi untuk kepentingan pengembangan dan kemajuan profesi.

Selain mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, organisasi profesi juga mendorong dan memotivasi para praktisi profesi di lapangan untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar yang disyaratkan, sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat dan kepuasan bagi para pengguna jasa layanan maupun masyarakat luas.

Ke depan, saya rencananya mengadakan pelatihan pijat refleksi. Ahli diundang untuk memberikan ilmunya. Dulu sudah ada asosiasi tukang pijat. Malah sempat ada pelatihan. Pesertanya banyak, sekitar 200 orang. Jadi, sangat mungkin, nantinya, tiap dusun ada satu tukang pijat.

Kegiatan pengembangan profesi dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan mutlak diperlukan. Bentuknya bisa bermacam, mulai dari riset, pelatihan, seminar, hingga simposium, baik yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau bekerja sama dengan pihak lain.

Selanjutnya, organisasi profesi dapat melayani anggotanya dari sisi kesejahteraan kehidupan bersama

dalam organisasi, serta dapat memberikan perlindungan hukum untuk kelancaran kegiatan profesi dan keamanan para anggota dalam bekerja, berikut pengabdianya kepada masyarakat.

Asosiasi profesi mengawal profesionalitas para anggota. Profesionalitas menunjuk pada kualitas atau sikap pribadi individu terhadap suatu pekerjaan. Untuk profesional, berbagai macam cara dapat ditempuh, salah satunya membentuk komunitas atau organisasi profesi. Organisasi tersebut bisa berfungsi untuk mengayomi, melindungi, dan tempat berbagi para pekerja untuk mencapai profesionalisme.

Praktiknya, semakin banyak pekerjaan yang diakui sebagai profesi maka akan semakin banyak pula organisasi profesi yang muncul.

Asosiasi profesi dapat membangun kepercayaan dalam diri masyarakat mengenai adanya persepsi tentang kompetensi. Dengan adanya organisasi profesi dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, sehingga kompetensi yang andal pada diri anggota dapat terwujud.

Para anggota asosiasi profesi juga tidak hanya memberikan sejumlah iuran rutin. Sebuah cara yang tidak efektif dalam mewujudkan profesionalitas. Anggota

organisasi dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi seperti mengomunikasikan berbagai pikiran dan pengalaman yang mengarah kepada pembaruan dan perbaikan mutu pelayanan.

Anggota asosiasi profesi secara aktif dapat melakukan evaluasi diri, baik secara perorangan maupun kelompok dalam hal praktik profesional, mengacu pada standar profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Basis komunitas profesi yang ada di Tamanmartani, oleh Pemerintah Kalurahan selanjutnya dikelola lebih masif dalam *platform* belanja daring, bernama *ngabeimart.com*. Terlebih saat pandemi Covid-19, dengan minimnya transaksi bertatap muka, terobosan ini menjadi relevan.

Komoditas yang di-*display* di Ngabei Mart adalah kebutuhan harian, produk Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM, farmasi dan apotek, *fashion*, peralatan elektronik, alat rumah tangga, furnitur dan mebel, alat tulis dan kantor, aksesoris *handphone*, perawatan hewan, bahan bangunan, jasa, tiket wisata, dan *booking homestay*.

Tidak lagi untuk warga perkotaan, *online market-place* via Google, misalnya, terasa familier untuk masyarakat pedesaan. Karena, banyak calon pembeli yang

memanfaatkan Google untuk mencari tahu, apa yang mereka akan beli. Integrasi antara *e-commerce* dengan Google Shopping akan memudahkan para penjual dengan menampilkan produk mereka pada halaman awal pencarian.

Di tengah warga, media sosial dirasa menjanjikan untuk berjualan *online*. Media sosial biasanya bisa dimanfaatkan jika target pasar yang ingin dijangkau berada di daerah yang sama. Karena, pembayaran sistem Cash on Delivery atau lazim disebut COD, dianggap lebih terpercaya dibanding harus membayar via transfer.

Peluang yang besar tersebut membuat Pemerintah Kalurahan Tamanmartani untuk mendorong para produsen semakin peka membaca pasar, termasuk tren dan kebiasaan konsumen, agar bisa mempersiapkan produk dan cara promosi yang sesuai. Lewat Ngabei Mart, warga bisa melakukan pengelolaan dan pengembangan bisnis agar hasil penjualannya maksimal.

Kembali ke perekonomian desa, meski tidak terlalu kentara, basis komunitas profesi yang sudah ada itu kemudian di-*display* lebih *marketable* dalam platform daring Ngabei Mart. Dari Tamanmartani untuk Tamanmartani. Memutarakan uang selama mungkin di Tamanmartani. Ngabei Mart bisa sebagai pemancing.

Belakangan, situs belanja daring atau *e-commerce* memang menjadi fenomena populer di Indonesia. Ada yang berpandangan, dapat menjadi tulang punggung perekonomian kota-kota kecil dan pedesaan.¹² Pemasaran berbagai produk unggulan desa dapat dipermudah dengan adanya sistem perdagangan elektronik.

Dengan adanya *e-commerce*, para perajin, petani, peternak, dan produsen lainnya dapat menjual produk mereka tanpa perlu bertemu langsung dengan para pembeli, sehingga produk yang dijual dapat dipasarkan, baik nasional maupun internasional.

Mengapa harus *e-commerce*? Alasan utamanya, tentu karena preferensi publik akan internet yang semakin meningkat. Bertambahnya jumlah pengguna internet memungkinkan terbukanya peluang *e-commerce* bertambah besar. Lihatlah, sekarang ini mudah rasanya menemukan gawai canggih di berbagai lapisan masyarakat. Dengan begitu, sebagian dari mereka dapat menikmati layanan belanja online, baik melalui media sosial, *marketplace*, maupun toko *online* biasa.

Alasan kedua adalah, semakin majunya teknologi finansial. Keberadaan perusahaan teknologi finansial

12. Alpha JWC Ventures dan Kearney. 2021. 'Unlocking Next Wave of Digital Growth: Beyond Metropolitan Indonesia'.

dengan layanan pembayaran *online* melalui aplikasi *e-wallet* maupun sistem kredit (*paylater*) terbukti memudahkan proses belanja *online*. Layanan yang disediakan oleh perusahaan seperti OVO Paylater, Shopee Paylater yang sekarang berubah menjadi SPayLater, serta Go-Pay Later berhasil meningkatkan persentase penjualan.

Ketiga, basis logistik atau pengantaran barang yang masih di seputaran Tamanmartani dapat diandalkan dan lebih praktis, serta membantu semua pihak untuk mendapatkan produk terbaik dengan harga yang bagus pula, sehingga berbagai produk bisa sampai ke konsumen dengan harga relatif terjangkau. Dengan kata lain, harus ada upaya memotong mata rantai logistik yang terlalu panjang dan berbelit, agar distribusi produk lebih terbantu.

Ngabei Mart pada praktiknya, benar-benar berkontribusi pada terjadinya transaksi dari dan oleh warga Tamanmartani. Pemerintah Kalurahan Tamanmartani pernah melakukan survei konsumsi beberapa waktu lalu. Sebagian kebutuhan warga kini bisa dipenuhi oleh tetangga sendiri, karena terhubung secara daring.

Kalau survei konsumsi itu misalnya kebutuhan beras warga sekian. Kalau bisa ditutup oleh orang

tamanmartani sendiri kan bagus. Itu sebabnya Ngabei Mart dibuat.

Jumlah warga Tamanmartani sebanyak 17.523 jiwa. Rata-rata tiap orang membutuhkan 0,3 kg per harinya, berarti sekitar 6 ton per harinya secara keseluruhan. Lahan pertanian di Tamanmartani sekitar 350 Ha. Semisal dihitung bisa panen padi dua kali saja per tahun, dengan asumsi per Ha menghasilkan 7 ton beras, terjadilah surplus.

Warga Tamanmartani tidak lagi memerlukan beras dari tempat lain. Apabila ada yang membeli beras dari tempat lain, boleh dibilang aneh. Guncangan ekonomi di Tamanmartani, faktanya berbeda dari kalurahan sekitarnya. Di Tamanmartani, bila benar-benar kepepet tidak bisa makan, berutang beras ke tetangga yang punya sawah, kemungkinan besar akan diberi.

Ngabei Mart, secara tidak langsung, dapat menjadi magnet kunjungan wisata. Ngabei Mart sebenarnya adalah promosi wisata Tamanmartani dengan sendirinya. Melalui internet, promosi untuk menarik orang untuk datang bisa diraih dengan waktu yang singkat, biaya yang terjangkau, dan yang terpenting adalah jangkauan promosi yang lebih luas.

Bertahap, pangsa pasar untuk penjualan bisa mencapai tingkat dunia internasional. Produk Indonesia

yang disukai pasar internasional, misalnya produk-produk barang kesenian seperti patung atau benda seni lainnya.

Sementara hasil perkebunan yang bisa diandalkan untuk menembus pasar internasional seperti kopi dan coklat bisa diatur dengan asosiasi tertentu, sehingga mampu menjaga keaslian dan kualitas dari produksinya.

Dan yang tidak kalah penting, Ngabei Mart adalah media edukasi bagi warga Tamanmartani. Perlahan, warga Tamanmartani mampu mencapai kompetensi dan *skill* yang mampu bersaing di kancah internasional.

Meski demikian, peluncuran Ngabei Mart bukan tanpa masalah berarti. Dalam pemanfaatan Ngabei Mart, diperlukan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan Tamanmartani, mulai dari bagaimana penetrasi internet di desa dan cara untuk meningkatkannya, bagaimana Ngabei Mart dikembangkan serta dimanfaatkan sedemikian rupa, lalu bagaimana warga memperoleh edukasi tentang *e-commerce*.

Selanjutnya, diperlukan pelopor gerakan melek *e-commerce* di Tamanmartani, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua kalangan dan golongan. Dengan tahapan-tahapan tersebut, diharapkan warga

mampu meningkatkan pemahamannya akan Ngabei Mart yang kemudian membuat kemandirian dalam memanfaatkannya secara baik dan benar, sehingga meningkatkan kesejahteraan, terutama perekonomian desa. Partisipasi dari warga Tamanmartani jelas menentukan.

Ngabei Mart, setidaknya dapat mengurangi benang kusut kemiskinan di pedesaan. Pemberdayaan masyarakat agar bisa mandiri, kompetitif, dan mampu bersaing distimulasi dengan cara kerja baru, cara digital. Meski kebutuhan pemberdayaan disesuaikan dengan tantangan, tapi tetap dengan memperhatikan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat.

Hadirnya Revolusi Industri 4.0 menimbulkan dampak persaingan yang ketat. UMKM didorong agar mampu mengatasi tantangan itu dengan penuh kreativitas, hingga ke teknologi.¹³

Revolusi Industri 4.0 identik dengan situasi kerja di mana manufaktur terhubung secara digital yang ditopang oleh empat unsur, yaitu Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, dan Artificial Intelligence.

13. Rusdi Hidayat N. dan Sonja Andarini. 2020. *Jurnal Bisnis Indonesia* (JBI) UPN Veteran Jawa Timur. Edisi Khusus Pengabdian Masyarakat. 'Strategi Pemberdayaan UMKM di Pedesaan Berbasis Kearifan Lokal di Era Industri 4.0'.

Digitalisasi diketahui masuk ke banyak industri. Peran-peran produksi yang selama ini dikerjakan oleh tenaga manusia, mulai digantikan oleh program-program digital, sehingga banyak sektor pekerjaan yang hilang. Tidak hanya pabrik-pabrik, tetapi juga beragam profesi, seperti akuntan, analis keuangan, konsultan, dokter, penerjemah, arsitek, pustakawan, telemarketer, kasir, pegawai pos, *teller*, agen, masih banyak yang lainnya.

Fenomena baru yang kemudian muncul dan masif adalah pemasaran produk yang dilakukan secara digital. Selain itu, harga gawai dan internet pun semakin terjangkau, serta bermunculan para wirausaha UMKM yang mengandalkan *e-commerce*.

Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan pada daya saing produk, pangsa pasar yang meluas, peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan pekerjaan baru. Kini lebih mudah turut dalam pelatihan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan tentang produk dan produksi yang baik, kemasan produk yang komersial, jaringan pemasaran yang baru, pengabdian pembinaan perbaikan kemasan. Produk pun kemudian dapat dipasarkan secara digital.

Kabar baiknya, dalam sudut pandang era digital, generasi milenial dan eksistensinya di media sosial

ternyata mampu memberi energi yang besar dalam pengembangan desa. Generasi milenial dalam pengembangan desa juga dapat berkomitmen menjaga tradisi sosial budaya, sehingga identitas diri dapat dipertahankan dan kelestarian alam dapat terjaga.

Selain jumlahnya yang besar, karakter generasi milenial secara tidak langsung sangat mendukung proses promosi. Peran generasi milenial mampu menjadi alat pemerata pembangunan dan mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi. Strategi pengemasan dan pengembangan desa kini tidak dapat melupakan peran generasi milenial.¹⁴

Karena bagaimanapun, pengembangan desa terkait erat dengan aspek sosial dan lingkungan. Selalu saja muncul kekhawatiran akan dampak industri di desa, lantas mendorong pentingnya komitmen seluruh komponen, termasuk generasi milenial. Terlebih, banyak orang di kota yang perlu berkunjung ke desa, dengan segenap kelebihannya.

Saling *tepo seliro* dan tenggang rasa harus selalu ada di desa. Saya yakin, 10 tahun lagi bisa menjadi sangat

14. Rosvita Flaviana Osin dan Ni Komang Purwaningsih. 'Peran Generasi Milenial dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal'. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* Undiknas Denpasar. Volume 5. No. 2. Desember 2020.

langka, kalau tidak dirawat. Kemampuan desa menjaga semua itu, menarik orang kota untuk hadir di desa.

Jadi, penyelenggaraan dan pengembangan desa mampu menjadi daya tarik wisata dan menjadi kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat lokal maupun dunia, akan tetapi tetap menjaga keutuhan dan keasliannya.

Orang yang hadir di Tamanmartani bisa jadi adalah mereka yang merasakan kejenuhan terhadap bentuk wisata modern dan membutuhkan kembali suasana kehidupan di alam pedesaan serta berinteraksi dengan masyarakat berikut aktivitas sosial budayanya.

Ngabei Mart dan tujuan membangun *branding* desa wisata Tamanmartani pada akhirnya dapat selaras dan sinergi. Semua kekuatan bersanding untuk saling melengkapi. Karena, pelayanan prima tentu saja berfondasi kekompakan warga dalam menerima pengunjung dan merawat citra baik masyarakat. Di alam digital, sekalinya terdengar kabar kurang sedap, bisa berpengaruh sangat signifikan pada eksistensi sebuah entitas, bahkan untuk mereka yang sudah sangat terkenal dan dibutuhkan.

Menyoal perekonomian Tamanmartani, Pemerintah Kalurahan berpikir sangat terbuka. Dinamika Tamanmartani, asalkan untuk kemajuan dan hidup yang lebih

baik, akan diterima sepenuh hati, sebagai bagian dari proses hidup. Ia yakin, kelak, semua ini akan dituai hasil baiknya, entah di tahun ke berapa.

Orang sudah percaya saya saya tidak bakal nakal soal uang. Di masyarakat, saya sudah dikenal kaya. Jadi, masyarakat percaya kalau saya tidak bakal nakal. Misalnya, membuat program hanya untuk menghabiskan anggaran. Itu yang saya pegang sampai sekarang.

Sister Village

Salah satu isu dan tantangan pembangunan desa saat ini adalah mewujudkan kemandirian desa sebagai entitas yang berdaulat dan berdaya saing. Sebagai desa yang berdaulat, dengan kewenangan dan potensi wilayahnya, seharusnya masyarakat desa mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, desa membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa baik kerja sama antar desa maupun kerja sama dengan pihak ketiga.

Kalurahan Tamanmartani berencana peningkatan ekonomi warga dengan cara bekerja sama dengan wilayah lain, atau bisa disebut dengan istilah ‘sister village’.

Konsep tersebut sudah lama ingin kami lakukan, bagaimana kita memiliki saudara di berbagai wilayah. Kerja sama ini pada intinya untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat Kalurahan Tamanmartani.

Kerja sama tersebut, misalnya membangun relasi dengan daerah yang memiliki potensi, kemudian potensi itu oleh warga Tamanmartani diolah sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi warga.

Contoh, para nelayan di Karimunjawa kita bikinkan kerja sama. Jadi, hasil tangkapan mereka dijual ke warga masyarakat Tamanmartani dengan harga di bawah standar, kemudian oleh warga Tamanmartani diolah.

Dalam kerja sama desa tersebut, masing-masing pihak dapat memberi dan mendapatkan keuntungan dari pihak lain, dengan tujuan utama memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sebuah inisiasi ketahanan ekonomi di tingkat desa.

Ketahanan ekonomi atau *economic resilience* secara mudah dipahami sebagai kemampuan atau kapasitas dari suatu sistem untuk menahan atau mengurangi kerusakan.¹⁵

15. Perrings, Charles. 2001. *Resilience and Sustainability Frontiers of Environmental Economics*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Definisi ketahanan ekonomi secara umum yang menggabungkan pertimbangan-pertimbangan dinamis mencakup stabilitas, adalah kemampuan dari suatu sistem untuk bisa pulih kembali dari suatu keadaan yang sangat mengejutkan.

Ada dua macam ketahanan. Pertama, ketahanan yang sifatnya melekat (*inherent*) yakni kemampuan di bawah keadaan normal seperti kemampuan untuk menggantikan masukan-masukan yang lain untuk sesuatu yang dikurangi atau dibatasi oleh suatu kejutan yang berasal dari luar.

Kedua, ketahanan yang sifatnya adaptasi yakni kemampuan dalam keadaan krisis karena kepandaian atau usaha-usaha yang lebih besar.

Sementara dalam Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa telah mengatur mengenai kerja sama desa. Kerja sama desa dapat dilakukan antar-desa atau pun desa dengan pihak ketiga. Dalam Undang-undang tersebut mengatakan, jika kerja sama desa merupakan hak setiap masyarakat desa dan pemerintah desa, sesuai dengan kewenangannya, untuk melakukan kerja sama dalam rangka mewujudkan kesejahteraannya dalam bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi dan kemampuannya.

Kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar-desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang. Pertama, pemerintahan desa. Kedua, pembangunan desa. Ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa, dan keempat adalah pemberdayaan masyarakat.

Kerja sama desa ini dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan di desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Jadi menurut undang-undang desa tersebut, kerja sama desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar-desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.

Pada prinsipnya dalam kerja sama, kompetisi antar-daerah yang mungkin terjadi tidak boleh mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi, yaitu kepentingan antar-wilayah, nasional, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kepentingan kedaerahan tidak boleh menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antara suatu daerah dengan daerah tetangganya.

Terbitnya Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa merupakan babak baru tata kehidupan masyarakat dan pemerintah desa. Berdasarkan prakarsa, kebutuhan, dan kewenangan di bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan, masyarakat dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan kewenangannya.

Setiap desa memerlukan desa lain dalam melakukan pembangunan desa, karena desa tidak dapat menangani sendiri semua hal yang dibutuhkan desa. Beberapa alasan penting perlunya kerja sama desa maupun kemitraan di antaranya adalah pertama, potensi sumber daya alam, sosial dan ekonomi desa tidak selalu sama antara desa yang satu dengan desa lainnya. Demikian pula relasi masyarakat antar-desa dapat terjalin dengan baik, atau sebaliknya, terdapat gejala-gejala perselisihan atau konflik.

Kedua, desa-desa ke depan sudah harus mampu menciptakan kemandirian khususnya dalam sistem pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, energi,

pendidikan, dan kesehatan. Desa yang tidak mampu dan tidak mempunyai potensi energi tidak dituntut untuk memenuhi secara mandiri. Maksud dari sistem pemenuhan kebutuhan dasar adalah cara atau mekanisme pemenuhan kebutuhan melalui kerja sama antar atau kemitraan dengan pihak ketiga.

Ketiga, tuntutan pengelolaan sumber daya alam semakin diarahkan pada penyesuaian tata kelola dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Keempat, program-program pembangunan sering kali menciptakan ketergantungan masyarakat desa atau desa pada penyelenggara program. Kerja sama dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat lintas desa dalam memperkuat kemandirannya sebagai subjek pembangunan.

Kerja sama desa merupakan salah satu pilihan masyarakat desa untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Di sisi lain, kerja sama desa merupakan salah satu indikator tumbuhnya pemahaman terhadap hak dan kewenangan yang dimiliki, pemahaman terhadap potensi sumber daya, tantangan yang dihadapi, serta solusi untuk menjadikan desa berkembang dan mandiri.

Implementasi kerja sama desa menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang mampu menekan ego kewilayahan dan mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kerja sama antar-daerah diharapkan menjadi salah satu metode inovatif dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik. Efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sebagainya juga menjadi isu yang penting, terutama untuk daerah-daerah tertinggal.

Peningkatan pelayanan publik juga termasuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur bisa mencakup jaringan, jalan, pembangkit listrik, dan sebagainya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Institute Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta telah menandatangani kesepakatan bersama tentang kerja sama pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.

Kesepakatan ini ditandai dengan acara penyerahan nota kesepakatan bersama, serta ditindaklanjuti dengan acara penandatanganan nota perjanjian kerja sama antara Pemkab Sleman diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Harda Kiswaya, dan IRE diwakili oleh Fadjar Sudarwo, selaku sekretaris IRE Yogyakarta.

Kerja sama Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan di Kabupaten Sleman yang tertuang dalam kesepakatan bersama ini dilaksanakan atas dasar kesetaraan, saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan, yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Sleman.

Adapun ruang lingkup dalam kesepakatan bersama meliputi kegiatan penyusunan kajian, isu strategis, dan rancangan kebijakan dalam rangka pembangunan kawasan dan sumber daya kalurahan di Kabupaten Sleman, serta penguatan kapasitas kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan di Kabupaten Sleman.

Kunto Riyadi berpandangan bahwa kerja sama sangat diperlukan dan membantu peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesepakatan bersama ini menjadi dasar hukum bagi Perangkat Daerah dalam pengembangan program dan kegiatan pembangunan desa/kalurahan di Kabupaten Sleman.

Bentuk kerja sama ini dapat berupa penyusunan *masterplan* Desa/Kalurahan dengan tiga materi pokok utama, yaitu penyusunan RPJMDes, Rencana Rinci Desa, serta Profil Desa.

Berpijak pada berbagai sumber, kerja sama dalam bentuk 'sister village' saya yakin dapat berjalan di Tamanmartani. Apalagi pada akhirnya, tujuan dari semua ini adalah kesejahteraan warga.

Wisata Era Digital

Komitmen Kalurahan Tamanmartani untuk mewujudkan smart village atau desa cerdas di wilayah tersebut terus dilakukan. Kalurahan ini terus berbenah baik dari segi infrastruktur dan sarana prasarana, termasuk digitalisasi.

Peran teknologi informasi sudah menjadi hal yang penting pada saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, berbagai bidang pekerjaan, seperti pendidikan, kedokteran, keamanan dan lain-lain kini telah menggunakan perangkat-perangkat teknologi. Salah satu perangkat teknologi tersebut salah satunya adalah CCTV (Closed Circuit Television).

Setelah menggandeng Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) dengan kerja sama dalam bentuk pengembangan jasa penginapan jenis *homestay*,

Tamanmartani juga berencana memasang CCTV di setiap sudut kalurahan.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan modern saat ini, CCTV merupakan satu unit kebutuhan yang tidak dapat tergantikan untuk menjaga atau memantau suatu tempat.

Pemasangan CCTV tersebut dalam upaya meningkatkan keadaan kalurahan yang lebih maju, mandiri, serta untuk menjaga keamanan, ketertiban juga kenyamanan di lingkungan sekitar warganya.

CCTV dapat mengantisipasi kejahatan dan membantu aparat kepolisian apabila ada tindak kejahatan yang memerlukan alat bukti, serta untuk memantau situasi kalurahan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Memasuki era industri 4.0, dunia wisata dihadapkan pada tantangan *digital tourism*. *Digital tourism* sendiri disebut tidak hanya soal promosi digital tapi juga menjamin keamanan wisatawan secara digital.

Fokus *digital tourism* adalah memastikan keamanan wisatawan bila ada dalam kondisi-kondisi darurat. Dengan adanya CCTV akan membuat para wisatawan nyaman ketika mengunjungi Kalurahan Tamanmartani.

Dengan diterapkannya CCTV, berbagai aktivitas warga dapat terpantau.

Namun, sebelum pemasangan CCTV, Pemerintah Kalurahan akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan masyarakat, termasuk dengan tokoh masyarakat. Semoga masyarakat menyambutnya dengan positif, sebagai upaya bersama menjaga keamanan wilayah. Saya mengharapkan peran serta warga masyarakat Tamanmartani dalam menjaga dan merawat wilayahnya.

Selain pemasangan CCTV, Kalurahan Tamanmartani gencar melakukan promosi wisata melalui berbagai media, terutama media sosial. Fenomena interaksi lewat media sosial yang semakin berkembang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam melakukan promosi.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menyatakan bahwa pengguna layanan internet di Indonesia sudah mencapai 62,9 juta pelanggan. Maka tidak heran bila Indonesia tercatat sebagai salah satu pengguna *Facebook* terbanyak di dunia dengan jumlah pengguna sebanyak sekitar 47 juta dan pengguna twitter sebanyak 19,7 juta.

Di antara para pengguna internet tersebut, banyak pula yang memiliki akun blog pribadi yang isinya

bervariasi, mulai dari masalah pribadi sampai memberikan informasi mengenai berbagai subjek. Perkembangan media sosial kemudian mengubah pola komunikasi masyarakat sekarang.

Masyarakat kini gemar menulis komentar mengenai isu apa pun, baik pribadi maupun isu sosial di dalam media sosial. Tulisan tersebut yang ditulis dalam jaringan, akan dapat langsung tersebar saat itu juga ke berbagai belahan dunia. Penyebaran informasi tidak lagi hanya melalui mulut ke mulut, namun juga lewat media sosial.

Bahkan penyebaran informasi lewat media sosial memiliki dampak yang lebih besar lagi, karena cakupannya yang meliputi seluruh dunia yang terkoneksi lewat jaringan. Berkembangnya kepopuleran media sosial yang begitu pesat tidak lain karena media sosial sangat efektif dan efisien dalam penyebaran informasi dan meminimalkan salah paham dalam penyampaian pesan.

Sementara itu, Erik Qoalam dalam bukunya yang berjudul *Socialnomics: How Social Media Transforms The Way We Live and Do Business* menyebutkan bagaimana para pemilik akun blog pribadi tidak menulis sesuatu karena tujuan tertentu, namun mereka melakukannya

karena mereka menyukainya. Sebagian besar dari para pemilik akun tersebut tidak berusaha mengiklankan apa pun, sehingga hal yang mereka sampaikan adalah penyampaian yang jujur.¹⁶

Begitu pula yang dilakukan oleh para penulis perjalanan yang menuliskan kisah mereka tanpa maksud apa-apa selain menceritakan pengalaman mereka kepada banyak orang. Media internet dipilih karena dapat diakses dengan mudah.

Dengan begitu, banyak orang yang tertarik untuk membaca dan menginginkan untuk mengalami berbagai pengalaman yang sama seperti para penulis tersebut. Para penulis tersebut juga membuka peluang bagi para pembacanya untuk berkomentar terhadap hal yang mereka tulis, sehingga proses komunikasi menjadi timbal balik, bukan hanya satu arah. Proses interaksi inilah yang sangat penting dalam penggunaan internet, terutama dalam media sosial.

Promosi melalui media sosial sangat terasa dampaknya. Kawasan Tamanmartani pun terus mengalami perkembangan pesat. Banyak tamu luar daerah yang datang menginap. Banyaknya wisatawan yang menginap

16. Qualman, Erik. 2009. *Socialnomics: How Social Media Transforms The Way We Live and Do Business*. Hoboken: Wiley.

di Tamanmartani, berbanding lurus dengan munculnya sejumlah UKM di bidang kuliner.

Adanya kawasan sentra kuliner di Dusun Karangmojo, misalnya, diharapkan dapat semakin mendorong pengembangan Kalurahan Tamanmartani sebagai desa wisata.

Pasalnya, di Kalurahan Tamanmartani sendiri sudah banyak terdapat kawasan wisata, seperti tubing Kali Opak, wisata air belik Jongkangan, wisata *outbound*, hingga edukasi pengolahan sampah.

Pemerintah mendorong Karangmojo menjadi kawasan wisata kuliner di tingkat desa. Berbagai jajanan kuliner bisa dijual oleh masyarakat di sana. Jika ada wisatawan yang datang mengunjungi sejumlah tempat wisata yang ada, bisa mampir membeli makanan atau pun oleh-oleh di Karangmojo.

Pengembangan kawasan wisata kuliner diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan jumlah kunjungan ke Tamanmartani, termasuk mendorong munculnya kawasan ekonomi baru di tingkat desa, khususnya Karangmojo.

Bahkan karena keterbatasan kamar, pengelola *homestay* kerap menolak sejumlah tamu yang hendak menginap. Selain dibantu KUD, pemasaran *homestay*

dilakukan oleh warga masyarakat Tamanmartani. Biasanya lewat media sosial di internet, seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram.

Pupuk Murah dari Kotoran Ternak

Indonesia merupakan negara agraris, di mana 40 persen mata pencaharian mayoritas penduduknya bertani atau bertanam cocok. Hal ini didukung dengan luas lahan serta keanekaragaman hayati, serta iklim yang mendukung untuk bercocok tanam.

Selain profesi sebagai petani, tidak sedikit masyarakat Indonesia menjadi peternak, baik peternak ayam, kambing, maupun sapi di berbagai daerah. Proses pengelolaan lahan pertanian sangat membutuhkan pupuk sebagai penunjang agar tanah tetap subur serta menambah jumlah produksi hasil pertanian.

Sejak adanya pupuk anorganik mengakibatkan petani beralih pada penggunaan pupuk anorganik. Selain mudah didapatkan, pupuk anorganik ini juga persediaannya tercukupi. Pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat

dengan campuran bahan kimia yang akan menyebabkan peningkatan populasi tanah, sehingga berdampak pada kesehatan para petani.

Data dari BPS melalui sensus Pertanian pada 2013, petani yang menggunakan pupuk anorganik mencapai 86,41 persen. Sementara, penggunaan pupuk berimbang (organik dan anorganik) hanya 13,5 persen dan organik 0,07 persen. Maka para petani hanya memikirkan hasil produksi tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus.

Untuk mendorong petani mengurangi penggunaan pupuk anorganik maka pemerintah membuat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah. Peraturan ini mendorong munculnya usaha pengolahan pupuk organik.

Selain itu, penggunaan pupuk kimia anorganik dengan jangka waktu yang lama diyakini dapat menurunkan kesuburan tanah. Beberapa pengaruh negatif pupuk anorganik terhadap tanah adalah tanah menjadi masam, tekstur tanah menjadi keras dan padat, kapasitas penyimpanan air menjadi berkurang, kandungan unsur hara akan menurun, mikroorganisme tanah menjadi

berkurang dan mati, dapat mencemari dan mengganggu keseimbangan lingkungan.

Salah satu usaha untuk mengurangi penggunaan pupuk anorganik adalah dengan pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan sebagai pupuk organik. Beberapa keuntungan atau kelebihan pupuk organik adalah bahwa pupuk organik mempunyai kandungan unsur hara yang lengkap baik hara makro maupun mikro.

Kandungan bahan organik yang tinggi dapat memperbaiki struktur maupun sifat fisik tanah sehingga mampu mengikat air. Selain itu, pupuk organik mengandung asam-asam organik, seperti asam humic, asam fulvic, dan hormon yang sangat baik untuk tumbuhan. Pupuk organik juga dapat menjadi penyangga pH tanah, sehingga unsur hara tanah berada dalam kondisi tersedia bagi tanaman. Dan yang terakhir bahwa pupuk organik aman digunakan dalam jumlah yang besar, aman bagi manusia, tumbuhan maupun aman bagi lingkungan

Kurangnya pemakaian pupuk organik di kalangan petani adalah karena minimnya informasi tentang pembuatan pupuk organik. Padahal, pupuk organik sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah dan dapat

dibuat dengan memanfaatkan kotoran ternak seperti sapi, daripada dibuang begitu saja sebagai limbah dan mengotori lingkungan.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Kalurahan Tamanmartani mengajak warganya untuk membuat pupuk murah yang terbuat dari limbah kotoran sapi dan sampah yang ada di wilayah Tamanmartani dan sekitarnya.

Ide pembuatan pengolahan limbah menjadi pupuk murah ini karena adanya keprihatinan mahalnya harga pupuk dan keinginan petani untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Hampir seluruh bahan baku berasal dari Tamanmartani dan kecamatan sekitar. Di Tamanmartani, bahan baku cukup melimpah.

Limbah peternakan dan pertanian, bila tidak dimanfaatkan akan menimbulkan dampak bagi lingkungan, berupa pencemaran udara, air dan tanah, menjadi sumber penyakit, dapat memacu peningkatan gas metan dan juga gangguan pada estetika dan kenyamanan.

Limbah ternak sebagai hasil akhir dari usaha peternakan memiliki potensi untuk dikelola menjadi pupuk organik seperti kompos yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan,

meningkatkan produksi tanaman, meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan.

Pupuk hasil olahan kotoran sapi dan sampah ini dijual murah kepada para petani dan sebagian ada yang dijual ke luar wilayah. Harga pupuk sangat terjangkau.

Selain sapi, kotoran dari binatang lain pun dapat digunakan sebagai bahan pupuk organik. Seperti kerbau, kuda, domba dan kambing.

Pengolahan pupuk limbah dikerjakan oleh para pemuda Karang Taruna Kalurahan Tamanmartani dengan bantuan peralatan dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2014. Pembuatan kompos diawali dengan pengumpulan kotoran sapi dengan cara pemanenan dari kandang, dilanjutkan dengan proses pengolahan menjadi kompos.

Limbah kotoran sapi dan sampah dikumpulkan dari kandang sapi seluruh warga di Dusun Tamanan Pabrik, kemudian dilakukan fermentasi terlebih dahulu agar kering dan tidak berbau. Proses selanjutnya, kotoran yang sudah kering dimasukkan ke dalam enam mesin, termasuk mesin penggiling.

Dari seluruh proses tersebut menghasilkan butiran pupuk. Setelah itu kemudian dilakukan pengemasan dalam karung masing-masing seberat 20 kilogram. Seluruh proses menggunakan mesin hingga proses pengepakan.

Mesin pengolahan pupuk organik Tamanmartani mampu memproduksi satu ton pupuk organik dengan delapan jam kerja sehari. Diharapkan dengan produksi ini kebutuhan pupuk murah tidak hanya dinikmati warga Tamanmartani, namun bisa lebih luas lagi memasarkannya ke sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman.

Sebelumnya, mesin-mesin pengolah pupuk itu sempat mangkrak karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan warga. Namun, berkat keinginan yang kuat dari warga dan Karang Taruna, akhirnya mereka belajar untuk dapat mengoperasikannya, sehingga saat ini banyak memberi manfaat ekonomi bagi warga.

Terlebih, Pemerintah Kabupaten Sleman selama ini memang berkomitmen bersama seluruh pihak dalam upaya mengatasi bahaya plastik. Ini motivasi kerja untuk atasi sampah dan cara sistematis dalam mengurangi, mengolah, dan melakukan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui kegiatan daur ulang

atau dikenal dengan istilah 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).

Menurut data dari Adipura KLHK 2018, komposisi sampah plastik di Indonesia sekitar 16% dari total timbunan sampah secara nasional dan sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan makanan dan minuman, kantong belanja, dan pembungkus barang lainnya. Dari total timbunan sampah tersebut, yang didaur ulang diperkirakan baru 10-15%, 60-70% ditimbun di TPA, dan 30% belum terkelola atau terbuang ke lingkungan terutama lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai, dan laut.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman mengajak masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan sampah plastik secara berkelanjutan. Bisa dengan redesain kemasan plastik, memanfaatkan kembali kemasan, atau mendaur ulangnya.

Menjadi penting pengelolaan sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Volume sampah di Kabupaten Sleman tercatat mencapai 2.500 meter kubik per hari. Namun jumlah tersebut belum termasuk sampah yang dihasilkan oleh kegiatan wisata dan pendidikan.

Berdasarkan data DLH Sleman, sampah yang disalurkan melalui armada truk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru mencapai 319,56 meter kubik per hari. Pengendalian sampah plastik ini membutuhkan partisipasi dan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Pemkab Sleman mendukung tumbuhnya pengelola sampah mandiri, semua pihak harus berpartisipasi dan berperan aktif untuk meminimalisir penggunaan plastik atau mengupayakan agar sampah plastik bisa didaur ulang.

Menyikapi permasalahan sampah dibutuhkan sinergitas dan upaya bersama dari seluruh pihak, baik Pemerintah, *stakeholders* lain dan tentu saja masyarakat yang berperan sebagai subjek maupun objek dalam permasalahan ini.

Salah satunya dapat dimulai dengan mengelola sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yaitu mulai mengelola sampah dengan mengurangi timbunan sampah terutama sampah Plastik, misalnya, dengan beralih menggunakan tas ramah lingkungan saat berbelanja. Memilah sampah menjadi sampah organik dan anorganik

Agar pengelolaan sampah selanjutnya dapat lebih mudah. Sampah organik bisa dibuat kompos sebagai

media tanam sedangkan sampah anorganik bisa dimanfaatkan untuk kerajinan atau bisa dijual. Terakhir, untuk residu sampah dapat dibuang ke TPA dengan memanfaatkan pelayanan pengangkutan UPT kebersihan BLH sehingga tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Permasalahan sampah tersebut optimis dapat teratasi dengan metode tersebut apabila muncul kesadaran dan kedisiplinan seluruh masyarakat untuk dapat menerapkannya secara bersama-sama. Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak untuk dapat bersama-sama menjalankan dan mengoptimalkan peran dan fungsinya masing-masing dalam upaya menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Sleman demi terjaganya kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Apalagi saat ini kita telah memiliki banyak kelompok pengelola sampah hingga tingkat RT, saya berharap keberadaan kelompok-kelompok pengelola sampah ini dapat menjadi pionir dalam menumbuhkan kepedulian masyarakat sekaligus dapat menjadi motivasi bagi perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

Di samping itu, berbagai upaya terkait permasalahan sampah juga telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman, di antaranya melakukan pembinaan pengelolaan

sampah rumah tangga melalui sosialisasi dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana meliputi pengadaan kompartemen, komposer, mesin pencacah organik, transfer depo, truk sampah, tempat Pembuangan Sampah Terpadu 3 R dan beberapa TPS yang tersebar di wilayah Sleman.

Pada 2020, tercatat ada penambahan 7 unit Dump Truck untuk mengangkut sampah. Penambahan armada truk sampah ini diharapkan dapat membantu Pemkab Sleman dalam mengatasi permasalahan sampah. Diharapkan dengan penambahan armada truk sampah ada perbedaan dan tidak ada lagi tumpukan sampah di Kabupaten Sleman yang didominasi sampah plastik.

Sementara itu, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja efektivitas penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun anggaran 2019 sampai dengan semester I tahun 2020 kepada Pemerintah Kabupaten Sleman. BPK melakukan pemeriksaan tersebut berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melakukan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai mengenai kinerja entitas. Dalam menilai kinerja, BPK mengembangkan kriteria dengan

menggunakan model kriteria yang telah dikomunikasikan dan dipahami bersama dengan entitas pemeriksaan.

Pemilihan pemeriksaan kinerja efektivitas penanganan sampah sebagai topik pemeriksaan kinerja didasari peningkatan kegiatan perekonomian dari sektor pendidikan, pariwisata, pelayanan kesehatan dan industri, serta bertambahnya jumlah penduduk di wilayah DIY menimbulkan berbagai permasalahan, dan salah satunya permasalahan sampah.

Untuk itu, BPK perlu berperan aktif mendorong dan membantu Pemerintah Daerah meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan persampahan. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan LHP tersebut, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyediakan sarana pengumpulan sampah berupa TPS3R sebanyak 24 unit, transfer depo sebanyak 17 unit, serta TPS yang disediakan bersama dengan masyarakat sebanyak 309 unit yang tersebar di 17 Kecamatan.

Identifikasi awal pemeriksaan tersebut karena sampah yang masuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan mayoritas sampah yang belum dipilah. Pemilahan sampah belum dilakukan secara memadai karena aturan tentang pemisahan dan pengelompokan sampah menurut jenis dan sifatnya belum disosialisasikan

dan diterapkan dengan memadai pada sarana penanganan sampah yang dimiliki.

Sarana dan prasarana TPA Piyungan sekarang tidak memadai, di mana umur ekonomis sudah habis dan sudah dalam kondisi *overload*. Selain itu, di TPA Piyungan tidak ada proses pemilahan yang sistematis, alat berat kurang, tidak terdapat backup energi listrik pada operasional serta jalan operasional masih menyatu dengan jalan masyarakat. Secara umum pengelolaan sampah masih mengikuti paradigma lama.

Sampah dikumpulkan, kemudian diangkut dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Piyungan, Bantul. Pada sistem tersebut, semakin banyak sampah yang harus dikelola maka biaya yang harus dikeluarkan juga semakin besar.

Padahal secara teoretis, untuk mengatasi persoalan sampah mengharuskan dilakukannya pergeseran pendekatan dari pendekatan ujung-pipa (*end-pipe of solution*) ke pendekatan sumber.

Dengan pendekatan sumber maka sampah ditangani pada hulu sebelum sampah itu sampai ke tempat pengolahan akhir (hilir). Pendekatan sumber menghendaki dikurangnya produk sampah yang akan dikirim ke tempat pengolahan akhir.

Cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi sampah antara lain pemilahan sampah dan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau pengurangan, penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah. Dengan demikian, pengolahan sampah di sumber penghasil sampah, termasuk rumah tangga merupakan kunci upaya penanganan sampah secara optimal.

Pengembangan Desa Wisata dengan Model Smart Village

Banyaknya jumlah desa di Indonesia menjadi tantangan dalam upaya pembangunan desa. Untuk mencapai pembangunan desa yang maksimal, Kementerian Desa pada tahun 2017 mencanangkan empat program prioritas untuk desa. Pertama, produk unggulan kawasan pedesaan. Kedua, membangun embung air desa. Ketiga, mengembangkan BUMDes. Keempat, membangun sarana olahraga desa.

Sedangkan dari bawah, desa secara mandiri mulai menunjukkan aktivitas pembangunan. Dana desa dalam beberapa kasus telah berhasil menstimulasi meningkatnya upaya pembangunan desa dari bawah.

Beberapa desa di Indonesia telah berhasil mengelola dana desa untuk percepatan pertumbuhan ekonomi mereka. Misalnya dengan mengelola dana desa melalui

pembangunan wisata berbasis BUMDes atau menciptakan ekonomi kreatif desa dengan pemanfaatan jejaring bisnis.

Geliat pembangunan desa melalui program-program desa yang inovatif tersebut pada akhirnya menginisiasi munculnya model pembangunan desa berbasis konsep smart village. Konsep ini diadopsi dari konsep smart city yang lebih dulu dikenal di Indonesia. Istilah smart village mulai dipakai oleh beberapa desa di Indonesia, salah satunya di Kalurahan Tamanmartani.

Pada periode kedua kepemimpinan saya berencana mewujudkan smart village atau desa yang cerdas. Selain itu, mengusahakan Kalurahan Tamanmartani sebagai penyangga wisata untuk candi Prambanan.

Istilah smart village diterjemahkan sebagai sebutan desa ‘cerdas’. Istilah ‘smart’ digunakan dalam rangka melawan stigma desa yang telah lama melekat pada desa. Seperti desa dianggap tidak berpendidikan, terbelakang, miskin, ketinggalan jaman, dan lain sebagainya. Saat ini desa dianggap mampu melakukan pembangunan masyarakatnya secara cerdas.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terjadi reposisi kewenangan penyelenggaraan pembangunan dari pemerintah

daerah ke pemerintah desa. Dalam proses pembangunan desa, pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting dan menjadi bagian dalam mendorong keberhasilan pembangunan desa.

Teknologi informasi menjadi alat selain untuk mempermudah proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan desa, juga menjadi media untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan desa. Teknologi informasi mempertemukan berbagai kepentingan untuk bisa dirumuskan secara bersama-sama menjadi sebuah kebijakan pembangunan desa.

Lingkungan pedesaan dalam konteks smart village tidak hanya diartikan sebagai lingkungan alam yang ada di desa, melainkan keseluruhan elemen yang membentuk satu tatanan sosial dan alam yang mencirikan karakter dari desa. Lingkungan pedesaan dalam tatanan sosial terdiri dari adat, budaya dan struktur sosial.

Dikaitkan dengan konteks smart village, pemanfaatan teknologi informasi dapat diterapkan baik dalam tataran lingkungan sosial maupun dalam tataran lingkungan alam. Dalam tataran sosial, pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperkuat nilai adat, budaya dan struktur sosial

yang ada, seperti pendataan, pendokumentasian serta pemanfaatan nilai adat dan budaya yang didasarkan kepada teknologi informasi yang ada.

Teknologi informasi juga digunakan untuk mengkreasikan nilai adat dan budaya agar lebih bisa dikontekstualisasikan dengan keadaan saat ini tanpa menghilangkan esensi dari adat dan budaya tersebut.

Di sisi lain, nilai adat dan budaya dapat dijadikan penangkal nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai adat dan budaya yang ada di desa. Adanya pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dalam konteks tatanan sosial di desa maka akan menciptakan kelestarian struktur sosial yang selama ini ada. Bahkan, nilai adat dan budaya yang terdapat di dalam struktur sosial tersebut dapat dikembangkan, dilestarikan sesuai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang.

Konteks pemanfaatan teknologi informasi dalam tatanan alam dapat digunakan dalam identifikasi potensi alam serta pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan teknologi informasi jangan merusak tatanan alam yang ada, tetapi harus berperan untuk memberikan cara dan pengetahuan kepada masyarakat untuk memanfaatkan

alam secara proporsional, seperti pemanfaatan teknologi informasi bidang pertanian berupa tersedianya informasi pertanian yang tepat waktu dan relevan bagi petani di desa agar para petani dapat menentukan rencana pola tani, pemanfaatan teknologi tersebut pada akhirnya slain akan meningkatkan keterampilan para petani, juga akan meningkatkan produktivitas pertanian yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mewujudkan itu semua, Berbagai cara dilakukan oleh Kalurahan Tamanmartani. Salah satunya dengan menggandeng Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri). Dengan kerja sama dalam bentuk pengembangan jasa penginapan jenis *homestay*. Sebanyak 12 *homestay* dibuka di rumah warga untuk menampung wisatawan yang berkunjung ke Candi Prambanan.

Dengan bantuan pembangunan *homestay* bisa memberdayakan sekaligus merangsang perputaran roda perekonomian masyarakat setempat. Karena, lokasi Kalurahan Tamanmartani yang cukup strategis, hanya berjarak sekitar 500 meter di sisi barat kompleks Candi Prambanan.

Pengelolaan 12 *homestay* masing-masing terdiri dua kamar ini nanti diserahkan kepada koperasi bentukan

warga. Nantinya, 10 persen dari total pendapatan bisa dimanfaatkan warga untuk pengembangan usaha.

Selain mendukung iklim pariwisata, bantuan tersebut diakuinya bertujuan mencetak pengusaha di tingkat desa agar mereka tidak lagi berkubang dalam kemiskinan.

Tak hanya penginapan, Damandiri juga membangun satu warung untuk menunjang desa wisata setempat. Semangatnya adalah memberdayakan masyarakat pedesaan agar kesejahteraannya bisa meningkat.

Saya optimis warganya bakal mengelola *homestay* dengan profesional. Saya berharap sesuai dengan tujuan awal, bantuan pengembangan *homestay* bisa meningkatkan kesejahteraan warga. Terkait biaya sewa, koperasi warga bakal menyesuaikan pasar wisatawan yang berkunjung ke Candi Prambanan.

Kerja sama dengan Yayasan Damandiri sejak 2017 tak hanya memberikan dampak langsung dari sisi ekonomi. Namun, juga telah mengubah wajah Kalurahan Tamanmartani. Seperti yang dirasakan oleh warga Dusun Karangmojo, mereka merasakan sekarang menjadi jauh lebih baik.

Tamanmartani menjadi lebih hidup. Dusun Karangmojo, dulu kawasan ini sepi, tapi sekarang ramai

dengan adanya sejumlah *homestay*, warung-warung, dan sebagainya.

Sejak adanya program dari Yayasan Damandiri, Dusun Karangmojo kini telah berubah menjadi salah satu wilayah pusat ekonomi di Kalurahan Tamanmartani. Di Dusun yang memiliki 250 kepala keluarga dan 800 penduduk tersebut perputaran ekonomi masyarakatnya tumbuh dan makin bergeliat.

Dulu, di sana tidak ada warung, tidak ada wisatawan yang mampir. Tapi sekarang, banyak sekali wisatawan yang datang menginap di sejumlah *homestay*. Warung-warung juga bermunculan, sehingga penghasilan dan ekonomi warga juga ikut meningkat.

Salah satu hal positif yang juga terlihat di Dusun Karangmojo saat ini adalah mulai munculnya kesadaran warga untuk lebih mandiri. Memanfaatkan perkembangan sektor pariwisata yang ada, tak sedikit dari warga mulai berani merintis dan membuka usaha kecil-kecilan di rumah mereka.

Padahal sejak lama, mayoritas warga di Dusun Karangmojo menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai buruh. Tapi, alhamdulillah kini perlahan hal itu mulai berubah.

Semoga keberadaan program Desa Cerdas Mandiri Lestari Yayasan Damandiri di Tamanmartani bisa terus berjalan di masa-masa yang akan datang, sehingga kesejahteraan seluruh warga pun akan semakin meningkat.

Kawasan ini pun terus mengalami perkembangan pesat, di mana banyak tamu luar daerah yang datang menginap serta banyak bermunculan sejumlah UKM di bidang kuliner. Terlebih di sana juga berdiri Warung Cafe Rakyat Damandiri.

Salah satu kafe kreatif atas kerja sama Kalurahan Tamanmartani dan yayasan Damandiri berada di sisi barat Candi Prambanan. Setiap sore khususnya akhir pekan, puluhan pelanggan yang didominasi anak-anak muda tampak memenuhi kafe ini.

Setiap hari terdapat sedikitnya 50 pelanggan yang selalu memenuhi warung itu. Saat akhir pekan maupun hari libur, jumlah pengunjung akan meningkat hingga dua kali lipat. Saat awal berdiri, omzet mereka hanya sekitar Rp50 ribu per hari. Namun kini sudah meningkat mencapai sekitar Rp400 ribu per hari.

Sejak efektif beroperasi pada akhir Januari 2018 lalu, keberadaan kafe mampu meraih pendapatan hingga belasan juta. Ke depan pihak pengelola berencana

mengembangkan kafe ini menjadi lebih luas, agar semakin memberikan manfaat pengembangan ekonomi Kalurahan Tamanmartani.

Banyaknya warga masyarakat yang mengunjungi kafe tersebut karena pihak pengelola telah menambahkan fasilitas internet atau WiFi gratis. Internet gratis sekarang sudah menjadi kebutuhan primer bagi warga masyarakat, terutama kaum milenial.

Selain fasilitas internet gratis, kafe juga menyediakan menu makanan dan minuman yang digemari pelanggan, khususnya pasar anak muda.

Pihak pengelola selalu berupaya memasarkan dan mengenalkan kafe melalui media sosial, seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram dan WhatsApp. Karena pemandangan dari warung ini sangat bagus, akhirnya banyak pelanggan yang tertarik untuk datang ke sini.

Sementara untuk *homestay*, sebelum pandemi Covid-19 merebak di seluruh Indonesia, setiap akhir pekan atau ketika memasuki musim libur panjang Natal dan Tahun Baru, puluhan *homestay* selalu diserbu pengunjung. Bahkan sejumlah kamar *homestay* milik warga sudah dipesan pelanggan sejak jauh hari.

Selain wisatawan yang hendak merayakan tahun baru di Yogyakarta, sejumlah pelanggan *homestay* juga

merupakan warga luar daerah yang hendak melakukan khitan di tempat sunat legendaris di kawasan Prambanan, Bogem.

Homestay dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tamanmartani Sejahtera. Perkembangan kampung homestay Damandiri di Kalurahan Tamanmartani terbilang menggembirakan. Hal itu tak terlepas dari potensi Kalurahan Tamanmartani yang terletak tak jauh dari lokasi wisata Candi Prambanan, serta sejumlah tempat seperti Bong Supit Bogem yang sudah sangat terkenal.

Dengan tarif yang terbilang murah, yakni Rp200 ribu per malam, fasilitas yang ditawarkan sejumlah *homestay* di Kalurahan Tamanmartani terbilang tak kalah dari penginapan sekelas hotel. Pasalnya, sejumlah pemilik *homestay* telah melengkapi dan menambah fasilitas kamar.

Bersama dengan pembangunan *homestay*, kafe tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Pada akhirnya mampu ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh warga desa.

Ada lagi kisah tentang Kampung Buah Karangmojo. Sejak dicanangkan sebagai Desa Cerdas Mandiri Lestari tahun 2017 lalu, masyarakat di Kalurahan Tamanmartani

tak henti melakukan berbagai inovasi untuk memajukan desa mereka. Salah satu potensi lokal yang terus dimaksimalkan adalah di sektor pariwisata.

Menindaklanjuti program pemberdayaan yang telah dilakukan Yayasan Damandiri, seperti pembentukan kampung *homestay* dan kafe rakyat, kini sejumlah warga pun mulai merintis spot-spot wisata baru di sejumlah dusun. Salah satunya, wisata edukasi kampung buah di Dusun Karangmojo.

Saat ini warga masyarakat Karangmojo mulai menyiapkan kampung wisata agro di 4 wilayah RT sejak sekitar 3 tahun lalu. Hal ini dilakukan karena melihat perkembangan pariwisata Dusun Karangmojo yang terus bergeliat seiring adanya program Desa Cerdas Mandiri Lestari dari Yayasan Damandiri.

Sejak adanya program *homestay* dan warung cafe dari Yayasan Damandiri, kampung ini menjadi lebih ramai. Banyak wisatawan luar daerah datang ke sini. Dari situ mereka berpikir bagaimana membuat spot wisata alternatif yang bisa bersinergi.

Dimulai di satu wilayah RT yakni RT 04, warga masyarakat berinisiatif untuk menanam berbagai macam jenis buah-buahan di pekarangan rumah mereka masing-masing maupun di sekitar lingkungan kampung. Bibit

buah tersebut mereka dapatkan dengan cara swadaya baik membeli atau mencangkok sendiri.

Saat ini sudah ada 137 macam jenis buah yang kita tanam. Sebagian juga sudah berbuah. Target kita nanti akan bisa mencapai 200 macam jenis buah.

Melalui upaya itu, diharapkan nantinya akan semakin banyak wisatawan, baik lokal maupun wisatawan luar daerah yang berkunjung ke Kalurahan Tamanmartani.

Dengan bersinergi dengan program Yayasan Daman-diri, diharapkan pemberdayaan di bidang pariwisata akan mampu meningkatkan pendapatan warga dusun, sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan semakin meningkat.

Tujuannya sederhana, agar masyarakat bisa punya penghasilan tambahan dari hasil menjual buah atau pun bibit yang ditanam, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Minimal lingkungan menjadi lebih bersih dan hijau. Kebutuhan buah masyarakat juga terpenuhi karena bisa dikonsumsi sendiri.



Bibliografi

- Basuki Sigit Priyono dkk. 2019. *Desa Mandiri*. Jakarta: Pusdatin Balilafto Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Dubrin, Andrew J. 2005. *Leadership*. Terj. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media.
- Ikatan Konselor Indonesia. 2008. *Arah Pemikiran Pengembangan Profesi Konselor*. Padang: IKI.
- Inskeep, Edward. 1991. *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Isbandi Rukminto Adi. 2013. *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Larson, Magali Sarfatti. 1978. *The Rise of Professionalism: a Sociological Analysis*. Berkeley, California: University of California Press.
- Perrings, Charles. 2001. *Resilience and Sustainability Frontiers of Environmental Economics*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Qualman, Erik. 2009. *Socialnomics: How Social Media Transforms The Way We Live and Do Business*. Hoboken: Wiley.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Triantoro Safaria. 2004. *Kepemimpinan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yukl, Gary. 2010. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Indeks.

Tentang Penulis



Gandang Hardjanata

adalah Lurah Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, periode 2012-2018 dan 2020-2026. Masa pengabdianya sebagai Lurah didedikasikan pada tekad menjadikan Kalurahan Tamanmartani sebagai Desa Mandiri.

Program utamanya, mewujudkan Smart Village atau desa yang cerdas, mengusahakan Tamanmartani sebagai penyangga wisata untuk Candi Prambanan.

Berbagai program unggulan yang diinisiasinya, yakni Tamanmartani Peduli dalam tajuk ‘One Day One Hundred’, menggandeng Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) membangun homestay dan kafe,

layanan administrasi jemput bola ‘Prima’, pembuatan pupuk murah, pelatihan kewirausahaan, membentuk asosiasi profesi tingkat desa, platform belanja daring ‘Ngabei Mart’, dan masih banyak lagi.

Lurah Gandang juga Ketua Paguyuban Surya Ndadari periode 2021-2024. Paguyuban para Lurah di Sleman ini diikuti oleh 86 Lurah, sebagai wadah mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah.